

**PENGARUH TINGKAT KEMISKINAN, PENGELUARAN PEMERINTAH
DI SEKTOR PENDIDIKAN, PENGELUARAN PEMERINTAH DI
SEKTOR KESEHATAN, DAN PENDAPATAN PERKAPITA TERHADAP
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2010-2016**



Oleh:

Mahar Amaini Laili

14190174

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E)**

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UIN RADEN FATAH PALEMBANG

2018



Alamat : Jl. Prof. KH. ZainalAbidinFikri, Telepon 0711 353276, Palembang 30126

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

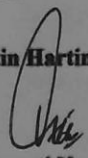
Formulir E.4

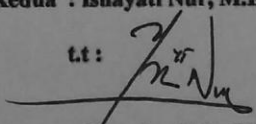
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI
PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

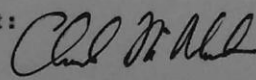
Nama : Mahar Amaini Laili
Nim/Jurusan : 14190174/ Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan, dan Pendapatan Perkapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Tahun 2010-2016

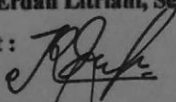
Telah diterima dalam ujian *munaqasyah* pada tanggal 05 Desember 2018

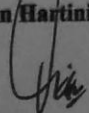
PANITIA UJIAN SKRIPSI

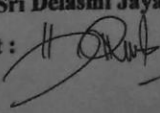
Tanggal Pembimbing Utama : Titin Hartini, SE, M.Si
t.t : 

Tanggal Pembimbing Kedua : Isnayati Nur, M.Esy
t.t : 

Tanggal Penguji Utama : Chandra Zaky Maulana. MM
t.t : 

Tanggal Penguji Kedua : Erdah Litriani, Ss, M. Ec.,Dev
t.t : 

Tanggal Ketua : Titin Hartini, SE, M.Si
t.t : 

Tanggal Sekretaris : Sri Delasmi Jayanti, M.Acc.,Ak., CA
t.t : 

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mahar Amaini Laili
NIM : 14190174
Jenjang : S1 Ekonomi Syariah

menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya seni sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, Desember 2018
Saya yang menyatakan,

Mahar Amaini laili
NIM 141190174



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri, Telepon 0711 353276, Palembang 30126

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul : Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan, dan Pendapatan Perkapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Selatan Tahun 2010-2016.

Ditulis oleh : Mahar Amaini Laili

NIM : 14190174

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (SE)

Palembang, 2018

Dekan,

Dr. Oodariah Barkah, M.H.I

NIP. 197011261997032002



KEMENTERIAN AGAMA
TAH PALEMBANG
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Prof. K.H. ZainalAbidinFikri, Telepon 0711 353276, Palembang 30126

NOTA DINAS

Formulir C.2

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam
UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu'alaikumWr.Wb.

Disampaikan dengan Hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi berjudul :

PENGARUH TINGKAT KEMISKINAN, PENGELUARAN PEMERINTAH DI SEKTOR PENDIDIKAN, PENGELUARAN PEMERINTAH DI SEKTOR KESEHATAN DAN PENDAPATAN PERKAPITA TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI SUMATERA SELATAN TAHUN 2010-2016

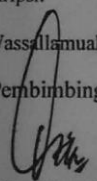
Yang ditulis Oleh:

Nama : Mahar Amaini Laili
NIM : 14190174
Program : S1 Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk diajukan dalam ujian *Komprehensif* dan ujian *Munaqosyah* ujian skripsi.

Wassalamualaikum wr. wb

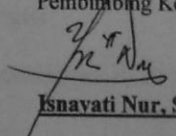
Pembimbing Utama


Titin Hartini, SE., M.Si

NIP. 197509222007102001

Palembang, September 2018

Pembimbing Kedua


Isnayati Nur, S.E.I, M

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Selatan dengan periode tahun 2010-2016, dengan melihat tingkat kemiskinan, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan sektor kesehatan, dan pendapatan perkapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu jumlah penduduk miskin, alokasi pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan sektor kesehatan serta PDRB perkapita dan Indeks Pembangunan Manusia di 15 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2010-2016 dan selanjutnya diolah menggunakan metode regresi data panel dengan program *eviews* 7.0 dan 10 sebagai alat pengolahannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia mampu dijelaskan oleh Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Sektor kesehatan, dan Pendapatan Perkapita sebesar 91.12% ($Adj R^2$), sedangkan sisanya yaitu sebesar 8,88% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian. Selanjutnya secara parsial, probabilitas dari masing-masing variabel independen menunjukkan, tingkat kemiskinan tidak berpengaruh terhadap IPM. Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan tidak berpengaruh terhadap IPM. Hal ini menandakan bahwa pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan belum optimal baik dari penggunaannya dan alokasinya. Sedangkan untuk pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan pendapatan perkapita berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2010-2016

Kata Kunci :Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan, Pendapatan perkapita, Indeks Pembangunan Manusia

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alief	-	Tidak Dilambangkan
ب	Ba>'	B	-
ت	Ta>'	T	-
ث	S a>'	S	s dengan titik di atas
ج	Ji>m	J	-
ح	H{a>'	H{	h dengan titik di bawah
خ	Kha>'	Kh	-
د	Da>	D	-
ذ	Z a>	Z	z dengan titik di atas
ر	Ra>'	R	-
ز	Za>'	Z	-
س	Si>n	S	-
ش	Syi>n	Sy	-
ص	S{a>d	S{	s dengan titik di bawah
ض	D{a>d	D{	d dengan titik di bawah
ط	T{a>'	T{	t dengan titik di bawah
ظ	Z{a>'	Z{	z dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-
ف	Fa>'	F	-
ق	Qa>f	Q	-
ك	Ka>f	K	-
ل	La>m	L	-
م	Mi>	M	-
ن	Nu>n	N	-
و	Wa>wu	W	-
ه	Ha>'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya>'	Y	-

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau terakhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (tasydid) ditulis rangkap

Contoh:

مقدم : Muqaddimah

ة نيدملا ةرونملا : Al-madi nah al- munawwarah

C. Ta>’ Marbutah *di akhir kata*

1. Bila dimatikan (ta’ marbutah sukun) ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

بِعِبَادَةِ : ditulis *bi’ibadah*.

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (ta’ marbutah sambung) ditulis t

بِعِبَادَةِ رَبِّهِ : ditulis *bi’ibadat rabbih*.

D. Huruf Vokal

1. Vokal Tunggal

- a. Fathah (---) = a
- b. Kasrah (---) = i
- c. Dhammah (---) = u

2. Vokal Rangkap

- a. (اِي) = ay
- b. (ي --) = iy
- c. (اَو) = aw
- d. (و --) = uw

3. Vokal Panjang

- a. (ا --) = a>
- b. (و --) = i>
- c. (ي --) = u>

E. Kata Sandang

Penulisan *al qamariyah* dan *al syamsiyyah* menggunakan *al-*:

1. *Al qamariyah* contohnya: ”الحمد“ ditulis *al-hand*
2. *Al syamsiyah* contohnya: “ النمل “ ditulis *al-naml*

F. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

G. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

H. Daftar Singkatan

H = Hijriyah

M = Masehi

Hal. = halaman

Sw. = *subhanahu wa ta'ala*

Saw. = *sall Allah 'alaihi wa sallam*

QS = al-Qur'an Surat

HR = Hadis Riwayat

Terj. = terjemah

I. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata ijmak, nas, dll), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

MOTTO dan PERSEMBAHAN

Motto:

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, karena itu apabila kamu sudah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhan mu lah hendaknya kamu berharap”. (Q.S. Al-Insyirah, 6-8)

“Kebahagiaan datang untuk orang yang berpikir positif”

“LOVE YOUR SELF”

Persembahan Untuk:

- ♥ **Kedua orangtuaku ayahanda Syahrul Shiamudin dan ibunda Aisyati yang senantiasa memberikan doa dan motivasi.**
- ♥ **Kakak dan adik kandung saya yang selalu memberikan dukungan serta bantuannya.**
- ♥ **Keluarga-keluargaku, terutama keluarga kosnku Desta Viani, Anggia Halima Tuzahra dan Debi Tasmana**
- ♥ **Sahabat saya satu perjuangan dari awal sampai akhir Laila Ramadhani Putri**
- ♥ **Almamaterku Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang**

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat memenuhi syarat kelulusan studi S1 Ekonomi Syariah UIN Raden Fatah Palembang dengan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Tingkat Kemiskina, Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan, dan Pendapatan Perkapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Selatan Tahun 2010-2016”**. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis panjatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Beserta para keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejaknya yang selalu istiqomah di jalan-Nya hingga akhir zaman.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tuaku yang merupakan sumber inspirasi dan senantiasa memberikan cinta, kasih sayang, dukungan, bimbingan, nasihat serta do'a yang tiada hentinya kepada penulis. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Selama penyusunan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dukungan semangat dan motivasi dari berbagai pihak demi

kelancaran penyusunan skripsi ini. Maka dari itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Sirozi, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
2. Ibu Dr. Qodariah Barkah, M.H.I selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Ibu Titin Hartini, S.E, M.Si selaku Ketua Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang sekaligus sebagai Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing serta memberi arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Isnayati Nur, M.Esy selaku dosen pembimbing II penulis yang telah meluangkan waktu untuk membimbing serta memberi arahan dalam penyusunan dalam skripsi ini.
5. Segenap Dosen Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang, yang telah banyak berperan aktif dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuannya kepada penulis.
6. Sahabat seperjuangan, Laila Ramadhani Putri, Intan Permata Sari, Devi Agusta, Desma Kartini, terima kasih atas bantuan, semangat, dan kerjasamanya dalam pembuatan skripsi ini.
7. Teman-teman EKI 4 angkatan 2014 dan semua pihak yang telah memberikan masukan, nasihat serta motivasi dalam penyusunan skripsi

ini. sahabat KKN kelompok 90 Anak Petai, sahabat seperjuangan dalam mengerjakan skripsi.

8. Serta semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan hasil penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, masih terdapat banyak kesalahan di sana sini. Semoga dengan terselesaikannya skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya bagi pembaca pada umumnya serta membuahkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan ridha Allah SWT. Aamiin
Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Palembang, Desember 2018

Mahar Amaini Laili

NIM. 14190174

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	16
1.3 Tujuan Penelitian	17
1.4 Manfaat Penelitian	18
1.5 Sistematika Penulisan	19
BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS	
2.1 Definisi Pembangunan Manusia	20
2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia	25
2.1.2 Pengukuran dan Komponen IPM	26
2.2 Kemiskinan	31
2.2.1 Pengertian Kemiskinan	31
2.2.2 Macam Kemiskinan	34

2.2.3 Indikator Kemiskinan	37
2.2.4 Penyebab Kemiskinan	39
2.2.5 Dampak Kemiskinan	39
2.3 Pengeluaran Pemerintah	43
2.3.1 Pengertian Pengeluaran Pemerintah	43
2.3.2 Teori Pengeluaran Pemerintah	46
2.3.3 Peran Pemerintah	49
2.3.4 Peran Pendidikan dan Kesehatan	49
2.4 Pendapatan Perkapita	51
2.4.1 Pengertian	51
2.4.2 Jenis-Jenis Pendapatan	52
2.4.3 Metode Perhitungan Pendapatan Perkapita	53
2.4.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi	54
2.4.5 Pandangan Islam Terhadap Pendapatan Perkapita	55
2.4.6 Manfaat Perhitungan Pendapatan Perkapita	56
2.5 Penelitian Terdahulu	57
2.6 Pengembangan Hipotesis	68
2.7 Kerangka Berfikir	74

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian	76
3.2 Jenis Dan Sumber Data	76
3.2.1 Jenis Data	76
3.2.2 Sumber Data	77
3.3 Populasi Dan Sampel	78
3.3.1 Populasi	78
3.3.2 Sampel	78
3.4 Variabel-Variabel Penelitian	79
3.4.1 Variabel Independen	79
3.4.2 Variabel Dependen	80
3.5 Definisi Operasional	80

1. Indeks Pembangunan Manusia	80
2. Kemiskinan	81
3. Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan	81
4. Pengeluaran Pemerinah Sektor Kesehatan	81
5. Pendapatan Perkapita	82
3.6 Teknik Pengumpulan Data	82
3.7 Teknik Analisis Data	82
3.7.1 Estimasi Regresi dengan Data Panel	84
3.7.2 Pemilihan Model Data Panel	86
3.7.3 Uji Asumsi Klasik	88
3.7.4 Uji Hipotesis	92
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Statistik Deskriptif	94
1. Indeks Pembangunan Manusia	94
2. Tingkat Kemiskinan	95
3. Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan	95
4. Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan	96
5. Pendapatan Perkapita	96
4.2 Uji Statistik	97
4.2.1 Estimasi Regresi dengan Data Panel	97
4.2.2 Memilih Metode Data Panel	100
4.2.3 Uji Asumsi Klasik	102
4.2.4 Uji Hipotesis	104
4.2.5 Pembahasan	107
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	118
5.2 Saran	120
DAFTAR PUSTAKA	122
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : IPM Sumatera Selatan Tahun 2010-2016	4
Tabel 1.2 : Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin	7
Tabel 1.3 : Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan	11
Tabel 1.4 : Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan	12
Tabel 1.5 : PDRB Perkapita Sumatera Selatan 2010-2016	13
Tabel 1.6 : <i>Research Gap</i>	14
Tabel 2.1 : Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM.....	27
Tabel 2.2 : Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu	63
Tabel 4.1 : Statistik Deskriptif	94
Tabel 4.2 : Regresi <i>Pooled Least Square</i>	97
Tabel 4.3 : Regresi <i>Fixed Effect Model</i>	98
Tabel 4.4 : Regresi <i>Random Effect Model</i>	99
Tabel 4.5 : Uji Chow	100
Tabel 4.6 : Uji Hausmant	101
Tabel 4.7 : Uji Multikolinieritas	103
Tabel 4.8 : Uji Heteroskedastisitas	104
Tabel 4.9 : Uji t-statistik parsial	105
Tabel 4.10 : Uji F-statistik	107

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran	74
Gambar 4.1 : Uji Normalitas	102

DAFTAR LAMPIRAN

1. Formulir C
2. Lembar Konsultasi Pembimbing 1
3. Lembar Konsultasi Pembimbing 2
4. Data Penelitian
5. Hasil Pengolahan Data

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sadar dan terus menerus untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik secara bersama-sama dan berkesinambungan. Menurut Todaro dan Smith dalam jurnal Meylina Astri, Sri Indah dan Harya Kuncara,¹ menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi ialah proses bertambahnya pendapatan nasional dari waktu ke waktu dan menjadi salah satu indikator untuk menghitung pembangunan ekonomi. Meskipun demikian, beberapa negara menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak diikuti dengan perbaikan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan ekonomi tidak saja diukur dari kenaikan produksi barang dan jasa yang berlaku dari tahun ke tahun, tetapi juga perlu diukur dari perubahan lain yang berlaku dari berbagai aspek kegiatan ekonomi seperti perkembangan pendidikan, perkembangan teknologi, peningkatan dalam bidang kesehatan, peningkatan dalam bidang infrastruktur yang tersedia dan peningkatan dalam pendapatan serta kemakmuran masyarakat.

Pembangunan merupakan syarat mutlak bagi kelangsungan hidup suatu negara. Menciptakan pembangunan yang berkesinambungan adalah hal penting yang harus dilakukan oleh sebuah negara dengan tujuan untuk menciptakan

¹ Meylina Astri, Sri Indah dan Harya Kuncara. “ Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia”, *jurnal pendidikan ekonomi dan bisnis* VOL.1 No. 1 Maret 2013

kondisi bagi masyarakat untuk dapat menikmati lingkungan yang menunjang bagi hidup sehat, umur panjang dan menjalankan kehidupan yang produktif. Pembangunan Sumber Daya Manusia mencakup peningkatan kapasitas dasar penduduk yang kemudian akan memperbesar kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan. Kapasitas dasar menurut Todaro yang sekaligus merupakan tiga nilai pokok keberhasilan pembangunan ekonomi ialah kecukupan (*sustenance*), jati diri (*selfsteem*), serta kebebasan (*freedom*). Kecukupan dalam hal ini merupakan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar yang meliputi pangan, sandang, kesehatan, dan keamanan.²

Meier dan Stiglitz juga berpendapat bahwa pada generasi kedua, teori pembangunan banyak menekankan pada akumulasi modal sumber daya manusia dengan menciptakan agen-agen pembangunan yang lebih produktif melalui pengetahuan, kesehatan yang lebih baik serta peningkatan keterampilan.³

Kualitas pembangunan manusia menjadi hal yang penting dalam strategi kebijakan nasional untuk pembangunan ekonomi. Pembangunan merupakan proses yang meningkatkan kualitas hidup dan kemampuan manusia dengan cara menaikkan standar kehidupan, harga diri dan kebebasan individu.⁴ Proses perubahan tersebut harus berkesinambungan yang mencakup keseluruhan aspek

² Christina Usmalidanti, “ Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2009”, *Skripsi*, (Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 1. (diterbitkan)

³ Ezra Valentino Calvin Suban, “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah sektor Publik terhadap Indeks Pembangunan Manusia 2007-2015”, *Skripsi*, (Jogjakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, 2017), hlm. 1. (diterbitkan)

⁴ Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith *Pembangunan Ekonomi*, (Penerbit Erlangga, 2011), hlm 6

kehidupan masyarakat baik ekonomi, sosial, dan budaya sehingga pembangunan merupakan syarat mutlak bagi kelangsungan hidup bernegara.

Pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki manusia. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan alat dari pembangunan. Pembangunan harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan akar dan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek.⁵

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai suatu proses memperoleh dan meningkatkan jumlah orang yang mempunyai keahlian, pendidikan dan pengalaman yang menentukan pembangunan ekonomi dan politik suatu negara.⁶

Untuk melihat tinggi rendahnya kualitas pembangunan manusia dapat diukur dengan indeks pembangunan manusia. Sejak tahun 1990, *United National for Development Program* (UNDP) mengembangkan sebuah indeks kinerja pembangunan yang kini dikenal sebagai indeks pembangunan manusia atau IPM (*Human Development Indeks*).⁷

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara khusus mengukur capaian pembangunan manusia menggunakan komponen dasar kualitas hidup.⁸ Menurut

⁵ BPS Sumatera Selatan

⁶ M.L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm 414

⁷ Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: STIM YKPN, 2010), hlm 46

⁸ BPS Sumatera Selatan

UNDP, perhitungan IPM pada saat ini menggunakan metode baru sejak 2010. Tolak ukur yang digunakan untuk menentukan kualitas hidup manusia adalah IPM dengan tiga komponen perhitungan, yaitu: (1) Angka harapan hidup/AHH pada waktu lahir (*life expectancy at birth*) mewakili kesehatan, (2) Harapan lama sekolah/HLS (*expected years of schooling/ EYS*) dan Rata-rata lama sekolah/ RLS (*mean years of Schoolinng/MYS*); dan (3) Kemampuan daya beli (*purchasing poweer parity*) yang dilihat dari pendapatata pendapatan perkapit.⁹ Melalui peningkatan ketiga indikator diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas hidup manusia.

Menurut data publikasi BPS pusat, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Selatan mengalami peningkatan yang cukup berarti dalam beberapa tahun terakhir terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Selatan tahun 2010-2016
Menurut Metode Baru

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
2010	64,44
2011	65,12
2012	65,79
2013	66,16
2014	66,75
2015	67,46
2016	68,24

Sumber: Badan Pusat Statistik

⁹ Mudrajad Kuncoro, *Mudah Memahami dan Menganalisis Indikator Ekonomi cetakan kedua*, Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2015), hlm 222

Tabel 1.1 menunjukkan capaian kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Selatan memiliki kecenderungan meningkat secara absolut. Berdasarkan hasil perhitungan BPS, IPM Sumatera Selatan tahun 2016 sebesar 68,24. Angka ini meningkat 0,78 point dari tahun 2015 dimana capaian pada tahun 2015 sebesar 67,46. Capaian ini merupakan agregasi dari tiga dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan serta standar hidup layak. Sejak periode 2011-2016, capaian IPM seluruh Kabupaten/Kota memperlihatkan peningkatan. Pada tahun 2016, sebagian besar Kabupaten/Kota memiliki capaian IPM yang berbeda dalam kategori sedang. Hanya kota Palembang, Prabumulih, dan Lubuklinggau yang capaian IPM-nya berada dalam kategori tinggi.¹⁰

Pemekaran wilayah sebagai salah satu dampak dari otonomi daerah turut berpengaruh besar terhadap capaian IPM suatu daerah.¹¹ IPM Provinsi Sumatera Selatan belum memperlihatkan nilai yang optimal, karena semakin dekat nilai IPM suatu wilayah terhadap angka 100, semakin dekat jalan yang harus ditempuh untuk mencapai sasaran yaitu angka harapan hidup, pendidikan dasar semua lapisan masyarakat (tanpa kecuali), dan tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup layak.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah penting yang dihadapi pemerintah yang mempengaruhi pembangunan manusia. Tingkat kemiskinan adalah persentase dari populasi yang pendapatan keluarganya berada di bawah suatu

¹⁰ BPS Sumatera Selatan

¹¹ *Ibid*

tingkat mutlak yang disebut garis kemiskinan.¹² Kemiskinan juga dapat menjadikan efek yang cukup serius bagi pembangunan manusia karena masalah kemiskinan merupakan sebuah masalah yang kompleks yang sebenarnya bermula dari kemampuan daya beli masyarakat yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan pokok sehingga kebutuhan yang lain seperti pendidikan dan kesehatanpun terabaikan.¹³ Hal tersebut menjadikan gap pembangunan manusia diantara keduanya pun menjadi besar dan pada akhirnya target capaian IPM yang ditentukan oleh pemerintah menjadi tidak terealisasi dengan baik.

Jumlah penduduk miskin penduduk Sumatera Selatan pada september 2016 mencaapai 1.096,50 ribu orang (13,39). Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada maret 2016, maka selama enam bulan tersebut terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 4,70% ribu orang. Sementara apabila dibandingkan dengan september 2015 maka dalam satu tahun terakhir jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebanyak 16,03% ribu orang. Dapat dilihat pada tabel berikut:¹⁴

¹² N. Gregoru Mankiw. *Principles of economics pengantar ekonomi mikro*. (jakarta: Salemba Empat, 2006), hlm 540

¹³ Denni Sulistio Mirza, "Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah tahun 2006-2009", *Economics Development Analysis Journal*. Vol 4, No 2, September 2011

¹⁴ BPS Sumatera Selatan

Tabel 1.2
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Sumatera Selatan Tahun 2010-2016

Tahun	Jumlah (000 Jiwa)	Persentase
(1)	(2)	(3)
2010	1.105,00	14,80
2011	1.061,87	13,95
2012	1.043,62	13,48
2013	1.104,57	14,06
2014	1.085,80	13,62
2015	1.145,63	14,25
2016	1.101,20	13,54
2017	1.086,92	13,19

Sumber: Badan Pusat Statistik

Jumlah dan persentase penduduk miskin di Provinsi Sumatera Selatan masih berfluktuasi. Namun, persentase penduduk miskin pada kurun waktu 2012-2016 dicapai pada september 2016 yaitu 13,39 persen yang mana mengalami penurunan sebesar 0,38 persen dibandingkan september tahun sebelumnya. Penurunan kemiskinan pada tahun 2016 dibarengi dengan penurunan pengangguran. Pada tahun 2016 tingkat pengangguran terbuka (TPT) berkurang 0,46 persen dari tahun sebelumnya. Persentase TPT tahun 2016, sebesar 5,61 persen lebih rendah dari tahun 2015 yang mencapai 6,07 persen atau berkurang. Penurunan persentase kemiskinan dan pengangguran yang melambat tersebut cukup memperlihatkan mengindikasikan kemiskinan dan pengangguran saling berkaitan satu sama lain. Pengangguran mendekati seseorang pada kemiskinan, karena berkurangnya

pendapatan sehingga pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang.¹⁵

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia sudah dilakukan sejak tanggal 1 Januari 2001. Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan. Diharapkan dengan adanya otonomi dan desentralisasi fiskla dapat lebih pemeratakan pembangunan sesuai dengan keinginan daerah untuk mengembangkan wilayah menurut potensi masing-masing. Menurut Brazelay pemberian otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal terkandung tiga misi utama, yaitu: (1) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, (2). Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. (3). memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.¹⁶

Anand dan Ravallion dalam jurnal Sudhir Anand dan Martin Ravilion yang menyatakan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan pembangunan manusia adalah peran dari pemerintah dalam mengalokasikan anggaran melalui pengoptimalan realisasi belanja pemerintah dalam pelayanan publik untuk

¹⁵ BPS Sumatera Selatan

¹⁶ Hadi Sasana, "Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah dan Pendapatan Perkapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah)", *Jurnal Media Ekonomi dan Manajemen*, Vol 25. No 1 Januari 2012.

mengalokasikan anggarannya kepada sektor-sektor prioritas yang memiliki dampak signifikan untuk perbaikan pembangunan manusia.¹⁷

Pengeluaran pemerintah dapat digunakan sebagai cerminan kebijakan yang di ambil oleh pemerintah dalam suatu wilayah. Pengeluaran pemerintah digunakan untuk membiayai sektor-sektor publik yang penting, diantara kesemua sektor publik saat ini yang menjadi prioritas pemerintah dalam mencapai pembangunan kualitas sumber daya manusia dalam kaitannya yang tercermin dari indeks pembangunan manusia adalah investasi pada sektor pendidikan dan kesehatan diharapkan investasi pada sektor ini akan berpengaruh pada peningkatan kualitas SDM dan mengurangi kemiskinan. Kesehatan serta pendidikan juga merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan.¹⁸

Untuk mendorong peringkat kualitas hidup masyarakat, pemerintah menerapkan penyelenggaraan otonomi daerah yang telah diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal didasarkan pada perimbangan bahwa pemerintah daerah lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya serta dengan dasar kebijakan penyediaan barang publik akan lebih efektif dan efisien jika dilakukan oleh tingkat pemerintah yang lebih dekat dengan masyarakat. Namun demikian adanya otonomi daerah juga dapat

¹⁷ Sudhir Anand dan Martin Ravillion. "Human Development in Poor Countries: On the Role of Private Incomes and Public Services", *Journal of Economic Perspectives*, VOL. 7. Pp. 133-150. November 1993

¹⁸ Christina Usmalidanti, " Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2009", *Skripsi*, (Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 6. (diterbitkan)

menghambat pembangunan daerah dan memperbesar ketimpangan karena tingkat kelembagaan daerah yang belum siap dalam pelaksanaan desentralisasi.¹⁹ Peran pemerintah sebagai pengambil kebijakan tentunya berperan pada sektor-sektor publik. Salah satunya dengan cara bagaimana pengeluaran pada sektor-sektor publik terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan.

Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan menurut Michael P. Todaro ada dua biaya pendidikan, yaitu: biaya-biaya pendidikan tidak langsung. Biaya pendidikan langsung individual ini yang kemudian dikenakan langsung pada pendapatan perkapita masyarakat. Biaya pendidikan langsung individual adalah segenap biaya moneter atau uang yang harus dipukul oleh siswa dan keluarganya untuk membiayai pendidikan.²⁰ Proporsi pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan, baik terhadap total pengeluaran pembangunan maupun Produk Domestik Bruto, secara tidak langsung menunjukkan reaksi pemerintah atas semakin tingginya permintaan atas sarana dan prasarana pendidikan.²¹

¹⁹ Ezra Valentino Calvin Suban, "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Publik terhadap Indeks Pembangunan Manusia 2007-2015", *Skripsi*, (Jogyakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, 2017), hlm. 5. (diterbitkan)

²⁰ Septiana M. Dkk, "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara", *Jurnal Berkah Ilmiah Efisiensi*. Vol.15 no.02, 2015

²¹ Hera Susanti, Moh. Ikhsan, Widyanti. *Indikator-indikator makroekonomi*. (jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1995), hlm 112

Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel 1.3 di bawah ini:

Tabel 1.3
Realisasi Anggaran Sektor Pendidikan Sumatera Selatan
Tahun 2010-2016(Juta Rupiah)

Tahun	Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan
2010	593.359.468.067,55
2011	298.218.433.000,00
2012	281096,408
2013	337.021.184
2014	371.147.965.000,00
2015	255.550.031.769,34
2016	130.161.690.422

Sumber: DJPK (Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan)

Tabel diatas menunjukkan bahwa alokasi dana pendidikan provinsi Sumatera Selatan mengalami naik turun, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan tersebut dimaksudkan agar mampu memaksimalkan tingkat angka melek huruf pada masyarakat. Walaupun demikian, kondisi sektor pendidikan tersebut harus ditunjang dengan sektor kesehatan gara mampu meningkatkan kualitas pembangunan manusia.

Pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan menurut undang-undang di Indonesia yang mengatur mengenai anggaran kesehatan pemerintah pusat dialokasikan minimal 5% dari APBN di luar gaji, sementara besar anggaran kesehatan pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dialokasikan minimal

10% dari APBN di luar gaji.²² Besarnya pengeluaran pemerintah untuk sub-sektor kesehatan menunjukkan seberapa jauh prioritas alokasi dana pemerintah untuk sektor kesehatan ini.²³ Dapat dilihat tabel 1.4 dibawah ini.

Tabel 1.4
Realisasi Anggaran Sektor Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2010-2016 (Juta Rupiah)

Tahun	Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan
2010	420.048.822.739
2011	335.210.439.000,00
2012	266.016.272
2013	176.955.092
2014	269.581.905.000,00
2015	366.025.623.272,83
2016	188.937.549.742

Sumber: DJPK (Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan)

Pendapatan perkapita riil umumnya dianggap sebagai sebuah hal yang mencerminkan hidup layak dan menangkap atau menggunakan semua variabel yang menggambarkan aspek-aspek dari kesejahteraan, namun tidak merepresentasikan harapan hidup dan melek huruf. Meskipun pendapatan perkapita tidak menggambarkan aspek yang lebih luas dari kesejahteraan seperti halnya IPM, pendapatan perkapita merupakan hal sangat penting dalam perbaikan pembangunan manusia. Pada dasarnya, hubungan yang erat antara

²² Septiana M. Dkk, "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara", *Jurnal Berkah Ilmiah Efisiensi*. Vol.15 no.02, 2015

²³ Hera Susanti, Moh. Ikhsan, Widyanti. *Indikator-indikator makroekonomi*. (jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1995), hlm 102

antara pertumbuhan ekonomi (yang diukur dengan kenaikan pendapatan perkapita) dan pembangunan manusia merupakan hal yang diharapkan.

Indikator kesejahteraan penduduk suatu daerah yakni PDRB per kapita²⁴ Norton menyatakan bahwa apabila pertumbuhan PDRB perkapita tinggi berarti terdapat lebih banyak pekerjaan yang lebih baik dan tingkat pendapatan yang lebih tinggi, secara ekonomi makro, PDRB per kapita dapat mempengaruhi indeks pembangunan manusia. Peningkatan PDRB per kapita akan meningkatkan standar hidup layak masyarakat sehingga daya beli juga mengalami peningkatan. Peningkatan. Peningkatan daya beli berdampak pada peningkatan indeks pembangunan manusia.²⁵ Dapat dilihat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Sumatera Selatan pada tabel 1.5 dibawah ini:

²⁴ Putu Seruni Pratiwi Sudiharta dan Ketut Sutrisna, "Pengaruh PDRB Per Kapita, Pendidikan, dan Produktivitas Tenaga Kerja terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali", *E-Jurnal EP Unud*, 3[10] : 431-439.

²⁵ Amirul Zamharir, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, PDRB Perkapita, dan Upah Minimum terhadap *Human Development Indek*" *Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, 2016), hlm 7 (diterbitkan)

Tabel 1.5
Produk Domestik Bruto Atas Harga Berlaku Sumatera Selatan
Tahun 2010-2016 (Juta Rupiah)

Tahun	PDRB Perkapita
2010	194.012.974
2011	206.360.699
2012	220.469.198
2013	232.176.048
2014	243.297.772
2015	254.044.876
2016	266.815.412

Sumber: Badan Pusat Statistik

Beberapa penelitian juga pernah melakukan penelitian tentang Indeks Pembangunan Manusia, hasil dari penelitian terdahulu terdapat beberapa variabel yang berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia, namun memiliki hasil yang sama dan berbeda atau tiak konsisten hasilnya, sehingga dilakukan penelitian lebih lanjut. Maka terjadi *research gap* mengenai pengaruh variabel independen yaitu tingkat kemiskinan, pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan sektor kesehatan dan pendapatan perkapita terhadap indeks pembangunan manusia. *Research gap* tersebut juga menjadi alasan untuk menelaah kembali mengenai hal-hal yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia. Berikut *Research Gap* dalam penelitian ini:

Tabel 1.6
Research Gap Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan dan Pendapatan Perkapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

No	Variabel	Hasil	Peneliti
1.	Tingkat Kemiskinan	Tingkat kemiskinan berpengaruh negatif terhadap indeks pembangunan manusia	Nursiah Chalid dan Yusbar Yusuf (2014)
2.	Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan	Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia	Septiana M. M. Sanggelorang, Vekie A. Rimate, dan Hanly F.DJ. Siwu (2015)
3.	Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan	Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia	Ajeng Pradesti Amanda Putri (2015)
		Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh negatif terhadap indeks pembangunan manusia	Sanggelorang, Vekie A. Rimate, dan Hanly F.DJ. Siwu (2015)
4.	Pendapatan perkapita	Pendapatan perkapita berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia	Amirul Zamharir (2016)
		Pendapatan perkapita belum berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia	Hadi Sasana (2012)

Sumber: Penelitian Terdahulu

Sumatera Selatan mengalami pertumbuhan IPM secara bertahap sehingga hal tersebut merupakan pencapaian positif bagi Provinsi Sumatera Selatan dalam mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakatnya. Meskipun IPM terus meningkat dari tahun ke tahun, status pembangunan manusia Sumatera Selatan pada tahun 2016 masih berstatus sedang. Melihat capaian pada tahun 2016 dan

perkembangannya dari tahun ke tahun, peluang Sumatera Selatan untuk masuk ke dalam kategori tinggi cukup besar. Dan hal ini membutuhkan kebijakan yang tepat dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Kualitas manusia di suatu wilayah memiliki andil besar dalam menentukan keberhasilan pengelolaan pembangunan di wilayah, karena indeks pembangunan manusia adalah suatu indikator untuk melihat bagaimana tingkat kesejahteraan suatu daerah dalam sebuah pembangunan daerah. Berdasarkan latar belakang di atas menarik untuk dibahas dalam skripsi yang berjudul **“Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan, dan Pendapatan Perkapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera selatan tahun 2010-2016”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, masalah dalam penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh tingkat kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia di Sumatera Selatan tahun 2010-2016?
2. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia di Sumatera Selatan tahun 2010-2016?
3. Bagaimana Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Sumatera Selatan tahun 2010-2016
4. Bagaimana pengaruh pendapatan perkapita terhadap indeks pembangunan manusia di Sumatera Selatan tahun 2010-2016?

5. Bagaimana pengaruh tingkat kemiskinan, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan pendapatan perkapita terhadap indeks pembangunan manusia di Sumatera Selatan tahun 2010-2016?

1.3 Tujuan Penulisan

Dengan mengacu pada latar belakang dan permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia di Sumatera Selatan tahun 2010-2016
2. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia di Sumatera Selatan tahun 2010-2016
3. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Sumatera Selatan tahun 2010-2016
4. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan perkapita terhadap indeks pembangunan manusia di Sumatera Selatan tahun 2010-2016
5. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kemiskinan, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan pendapatan perkapita terhadap indeks pembangunan manusia di Sumatera Selatan tahun 2010-2016.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan studi tambahan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada umumnya dan mahasiswa jurusan ilmu ekonomi
2. Dapat digunakan sebagai masukan bagi peneliti-peneliti yang lain dengan tipe penelitian sejenis.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi dengan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORITIK DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bagian ini mengkaji teori yang akan digunakan dalam penelitian untuk mengembangkan hipotesis dan menjelaskan fenomena hasil penelitian sebelumnya. Dengan menggunakan teori yang telah dikaji dan juga penelitian-penelitian sebelumnya, hipotesis-hipotesis yang ada dapat dikembangkan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan setting penelitian, desain penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data,

variabel-variabel penelitian, instrumen penelitian (uji validitas dan reabilitas), dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dan gambaran umum obyek penelitian, karakteristik responden, data deskriptif, analisis data (d disesuaikan dengan teknik analisis yang digunakan), hasil pengujian hipotesisi, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini terdiri: simpulan yang menunjukkan keberhasilan tujuan dari penelitian, simpulan juga menunjukkan hipotesis mana yang didukung dan mana yang tidak didukung oleh data. Implikasi dari penelitian yang menunjukkan kemungkinan penerapannya. Kelebihan dan kekurangan. Saran-saran yang berisi keterbatasan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran bagi penelitian yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORITIK DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Definisi Pembangunan Manusia

Definisi pembangunan manusia menurut UNDP (*United National Development Programme*) adalah suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk.²⁶ pembangunan manusia juga didefinisikan sebagai suatu proses memperoleh dan meningkatkan jumlah orang yang mempunyai keahlian, pendidikan dan pengalaman yang menentukan pembangunan ekonomi dan politik suatu negara. Jika mengacu pada pengertian tersebut, maka maju mundurnya suatu bangsa biasanya ditentukan oleh tingkat sumber daya manusianya, sehingga sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor dominan dalam pemanfaatan sumber daya alam (SDA).²⁷

Sebuah proses pertumbuhan ekonomi, lazimnya orang lebih menekankan arti penting akumulasi modal fisik, namun sekarang disadari bahwa pertumbuhan persediaan modal nyata sampai batas-batas tertentu tergantung pada pembentukan modal manusia.²⁸ Yaitu “proses peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan seluruh rakyat suatu negara”²⁹

²⁶ Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, *Indeks Pembangunan Manusia Sumatera Selatan* 2016.

²⁷ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2008), hlm 25

²⁸ M.L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm 415

²⁹ F.H. Harbison dan C. A. Meyers, *Education, Manpower and Economic Growth*, 1964, dikutip oleh M.L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm 415

Pembangunan dapat dilihat dalam perspektif dan ukuran yang berbeda, diperlukan persamaan persepsi dan kriteria dalam makna pembangunan. Pembangunan pada awalnya hanya diarahkan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebagai wujud tingkat kesejahteraan penduduk yang tinggi pada suatu negara. Kenyataan bahwa pengalaman pada dekade 1950-an dan dekade 1960-an, ketika banyak di antara negara dunia ketiga mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi sesuai target mereka, namun gagal memperbaiki taraf hidup sebagian besar penduduknya, menunjukkan sesuatu yang salah dalam definisi pembangunan yang di anut selama itu.

Singkatnya pembangunan ekonomi mengalami redefinisi penghapusan dan pengurangan tingkat kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan, dan penyediaan lapangan kerja dalam konteks perekonomian yang terus berkembang. Definisi pembangunan ekonomi lebih didasarkan pada konsep “redistribusi hasil pertumbuhan”. Dalam salah satu publikasi resminya, yakni *World Development Report*, yang terbit tahun 1991, Bank Dunia melontarkan pernyataan tegas bahwasanya; tantangan utama pembangunan adalah memperbaiki kualitas kehidupan, terutama di negara-negara yang paling miskin, kualitas hidupan yang lebih baik memang mensyaratkan adanya pendapatan yang lebih tinggi namun, yang dibutuhkan bukan hanya itu. Pendapatan yang lebih tinggi hanya merupakan salah satu dari sekian banyak syarat yang harus dipenuhi.

Banyak hal lain yang harus diperjuangkan, yakni pendidikan yang lebih baik, peningkatan standar kesehatan dan nutrisi, pemberantasan kemiskinan,

perbaikan kondisi lingkungan hidup, pemerataan kesempatan, peningkatan kebebasan individual, dan pelestarian ragam kehidupan budaya.³⁰

Berdasarkan pernyataan Bank Dunia tersebut maka dapat dikatakan bahwa pembangunan merupakan proses multidimensional yang memiliki cakupan luas bukan hanya semata untuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun mencakup juga struktur sosial, sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional dengan tetap memacu pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga tujuan utama dari pembangunan manusia, yaitu³¹:

- a. Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan yang pokok seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan perlindungan keamanan.
- b. Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan, tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan, yang kesemuanya itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materil, melainkan juga menumbuhkan harga diri pada pribadi dan bangsa yang bersangkutan.
- c. Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari belitan sikap menghamba dan ketergantungan, bukan hanya

³⁰ Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith *Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006), hlm 20-22

³¹ *Ibid*, hlm 28

terhadap orang atau negara-negara lain, namun juga terhadap setiap kekuatan yang beroperasi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan mereka.

Pendekatan pembangunan manusia menggabungkan aspek produksi dan distribusi komoditas serta peningkatan dan pemanfaatan kemampuan manusia. Pembangunan manusia melihat secara bersamaan semua isu dalam masyarakat, pertumbuhan ekonomi, perdagangan, kesejahteraan, kebebasan politik ataupun nilai-nilai kultural dari sudut pandang manusia.³²

Berdasarkan konsep pembangunan manusia, penduduk di tempatkan sebagai tujuan akhir sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana mencapai tujuan itu. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, ada empat hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu:

a. Produktifitas

Manusia harus berkemampuan untuk meningkatkan produktifitasnya dan berpartisipasi penuh dalam proses mencari penghasilan dan lapangan kerja. Oleh karenanya, pertumbuhan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan manusia.

b. Pemerataan

Setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapuskan

³² Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, *Indeks Pembangunan Manusia Sumatera Selatan* 2016.

hingga semua orang dapat berpartisipasi dan mendapatkan keuntungan dari peluang yang tersedia.

c. Keberlanjutan

Akses terhadap peluang/kesempatan harus tersedia bukan hanya untuk generasi sekarang tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Semua bentuk sumber daya; fisik, manusia, alam harus dapat diperbaharui.

d. Pemberdayaan

Pembangunan harus dilakukan oleh semua orang, bukannya semata-mata untuk semua orang. Semua orang harus berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan dan proses yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Pembangunan manusia lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi tetapi tidak anti terhadap pertumbuhan. Dalam perspektif pembangun manusia, pertumbuhan ekonomi bukanlah tujuan akhir. Pertumbuhan ekonomi adalah alat untuk mencapai tujuan akhir, yaitu memperluas pilihan-pilihan bagi manusia. Perhatian pembangunan manusia tidak hanya terfokus pada laju pertumbuhan ekonomi tetapi juga pada aspek pendistribusiannya. Jadi bukan hanya masalah berapa besarnya, tetapi juga pertumbuhan yang seperti apa.³³

Aspek pembangunan manusia ini dapat dilihat dari indeks pembangunan manusia (IPM). Indeks Pembangunan manusia merupakan salah satu alternatif penukuran pembangunan selain menggunakan *Gross Domestic Bruto*. Nilai IPM

³³ Badan Pusat Statistik 2016

suatu negara atau wilayah menunjukkan seberapa jauh negara atau wilayah itu telah mencapai sasaran yang ditentukan yaitu angka harapan hidup, pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat (tanpa terkecuali), dan tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup layak.³⁴

2.1.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Sejak tahun 1990, *United National for Development Program* (UNDP) mengembangkan sebuah indeks kinerja pembangunan yang kini dikenal sebagai Indeks Pembangunan Manusia atau IPM (*Human Development Indeks*).³⁵ Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara khusus mengukur capaian pembangunan manusia menggunakan komponen dasar kualitas hidup. IPM mengukur pencapaian keseluruhan dari suatu negara dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat, diukur dengan harapan hidup pada saat lahir, pengetahuan/tingkat pendidikan, diukur dengan kombinasi antara angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah serta hidup layak yang diukur dengan pengeluaran per kapita.³⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, IPM digunakan untuk mengklasifikasi antara negara maju dan negara berkembang atau negara terbelakang melalui kualitas mutu sumber daya manusianya. Selain itu juga IPM digunakan untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi negara terhadap kualitas hidup. Pada dasarnya IPM mencakup tiga komponen yang dianggap mendasar bagi manusia

220 ³⁴ Nurul Huda, DKK, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta : Prenadamedia, 2015), hlm

³⁵ Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: STIM YKPN, 2010), hlm 46

³⁶ BPS Sumatera Selatan 2016

dan secara operasional mudah dihitung untuk menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya pembangunan manusia, artinya IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup.³⁷

2.1.2. Pengukuran dan Komponen Indeks Pembangunan Manusia

1. Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia

Dalam indeks pembangunan manusia terdapat tiga komposisi indikator yang digunakan untuk mengukur besar indeks pembangunan manusia suatu negara, yaitu³⁸:

- a. Tingkat kesehatan diukur harapan hidup saat lahir (tingkat kematian bayi)
- b. Tingkat pendidikan diukur dengan jumlah penduduk yang melek huruf atau tingkat pendidikan yang telah dicapai atau lamanya pendidikan seseorang penduduk.
- c. Standar kehidupan diukur dengan tingkat pengeluarnya per tahun.

Setiap komponen IPM distandarisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Untuk menghitung indeks masing-masing komponen IPM digunakan batas maksimum dan minimum seperti terlihat dalam tabel 2.1 berikut:³⁹

³⁷ Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, *Indeks Pembangunan Manusia Sumatera Selatan* 2016.

³⁸ Christina Usmalidanti, “ Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2009”, *Skripsi*, (Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 25 (diterbitkan)

³⁹ Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, *Indeks Pembangunan Manusia Sumatera Selatan* 2016.

Tabel 2.1
Nilai Maksimum dan Minimum dari setiap komponen IPM

Indikator	Satuan	Minimum		Maksimum	
		UNDP	BPS	UNDP	BPS
Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Tahun	20	20	85	85
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	0	0	18	18
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	0	0	15	15
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		100 (PPP U\$)	1.007.436* (Rp)	107.721 (PPP U\$)	26.572.325* (Rp)

Sumber: BPS Sumatera Selatan 2016

Batas maksimum minimum mengacu pada UNDP kecuali indikator daya beli.

Keterangan :

* daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara-Papua

** daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025

Setelah melakukan perhitungan akan ditentukan hasil berupa angka skor berkisar antara 0-100. Pengklasifikasian pembangunan manusia bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama

dalam hal pembangunan manusia. Capaian IPM diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, yaitu:⁴⁰

- a. Rendah : IPM kurang dari 60;
- b. Sedang : $60 \leq \text{IPM} < 70$
- c. Tinggi : $70 \leq \text{IPM} < 80$
- d. Sangat tinggi : $\text{IPM} \geq 80$

2. Komponen-Komponen Indeks Pembangunan Manusia

Sebagai ukuran kualitas hidup IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian yang luas karena terkait banyak faktor di dalamnya. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU), diuraikan sebagai berikut:⁴¹

a. Angka Harapan Hidup Saat Lahir – AHH

Angka harapan hidup saat lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir, AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan.

⁴⁰ Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, *Indeks Pembangunan Manusia Sumatera Selatan* 2016.

⁴¹ BPS Sumatera Selatan 2016

Besarnya nilai maksimum dan nilai minimum untuk masing-masing komponen ini merupakan nilai besaran yang mengacu pada UNDP. Pada komponen angka harapan hidup, angka tertinggi sebagai batas atas untuk perhitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah 20 tahun.

b. Tingkat Pendidikan

Untuk mengukur dimensi pengetahuan penduduk digunakan dua indikator yaitu rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) dan angka harapan lama sekolah (*expected years of schooling*). Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitung rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

Angka harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Sama halnya dengan komponen AHH, nilai minimum dan maksimum pada masing-masing komponen ini mengacu pada UNDP. Untuk komponen rata-rata lama sekolah angka tertinggi sebagai batas atas untuk perhitungan indeks dipakai 15 tahun dan terendah 0 tahun. Sedangkan untuk angka harapan lama sekolah, nilai minimum adalah 0 tahun dan maksimum 18 tahun.

c. Standar Hidup Layak

Selanjutnya dimensi ketiga dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Nasional Bruto (PNB) per-kapita, sedangkan BPS menggunakan pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purcashing power parity-PPP*).

Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari susenas, dihitung dari level Provinsi hingga level Kab/Kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konsta/rill dengan tahun dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non makanan. Metode perhitungan paritas daya beli menggunakan metode rao

2.2. Kemiskinan

2.2.1. Pengertian Kemiskinan

Secara ekonomi, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat kekurangan sumber daya yang dapat digunakan memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Bappenas mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan menurut PBB didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya, seperti tidak dapat memenuhi kesehatan, standar hidup, kebebasan, harga diri dan rasa hormat seperti orang lain. Selain itu menurut Bank Dunia, dalam definisi kemiskinan: *“the denial of choice and opportunities most basic for human development to lead a long healthy, creative life and enjoy a decent standard of living freedom, self esteem and the respect of other”*.⁴²

Secara umum, kemiskinan ialah ketidak mampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar standar atas setiap aspek kehidupan. Menurut Sumitro Djojohadikusumo pola kemiskinan ada empat yaitu, pertama adalah *persistent proverty*, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun. Pola kedua adalah *cyclical proverty*, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi

⁴² Christina Usmalidanti, “ Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2009”, *Skripsi*, (Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 40 (diterbitkan)

secara keseluruhan. Pola ketiga adalah *seasonal proverty*, yaitu kemiskinan musiman seperti dijumpai pada kasus nelayan dan petani tanaman pangan. Pola keempat adalah *accidental proverty*, yaitu kemiskinan karena terjadinya bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat

Sedangkan menurut BPS (Badan Pusat Statistik), tingkat kemiskinan didasarkan pada jumlah rupiah konsumsi berupa makanan yaitu 2100 kalori per orang per hari (dari 52 jenis komoditi yang dianggap mewakili pola konsumsi penduduk yang berda dilapisan bawah), dan konsumsi nonmakanan (45 jenis komoditi makanan sesuai kesepakatan nasional dan tidak dibedakan antara wilayah pedesaan dan perkotaan). Patokan kecukupan 2100 kalori ini berlaku untuk semua umur, jenis kelamin, dan perkiraan tingkat kegiatan fisik, berat badan, serta perkiraan status fisiologis penduduk, ukuran ini sering disebut dengan garis kemiskinan. Penduduk yang memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan dikatakan dalam kondisi miskin.⁴³

Menurut para ahli, kemiskinan itu bersifat multidimensional. Artinya, karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek. Dilihat dari kebijakan umum, maka kemiskinan meliputi aspek primer yang berupa miskin akan aset, organisasi sosial politik, dan pengetahuan serta keterampilan; dan aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut

⁴³ Muhammad Sri Wahyudi Suliswanto, "Pengaruh PDB dan IPM terhadap Angka Kemiskinan di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol 8 No. 2. Desember 2010

termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah.

Menurut Ravallion, kemiskinan adalah kelaparan, tidak memiliki tempat tinggal, bila sakit tidak mempunyai dana untuk berobat. Orang miskin umumnya tidak dapat membaca karena tidak mampu bersekolah, tidak memiliki pekerjaan, takut menghadapi masa depan, kehilangan anak karena sakit. kemiskinan adalah ketidakberdayaan, terpinggirkan dan tidak memiliki rasa bebas.⁴⁴

Kata miskin asal katanya adalah *as-sakan*, artinya yaitu lawan dari hal yang selalu bergolak dan bergerak. Ibnu Faris berkata “huruf *sin*, *kaf* dan *nun* adalah huruf asli dan umum menandakan pada suatu makna kebalikan dari hal yang bergerak dan bergejolak, seperti dikatana, ‘*sakan asy-syari’u yasakanu sukunan sakina*. Sehingga dapat diartikan bahwa orang yang tidak memiliki apa-apa atau tidak mencukupi kebutuhannya. Dan miskin dikarenakan kondisi dan situasinya.⁴⁵ Al-Ghozali mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidak mampuan seseorang memenuhi kebutuhan mereka sendiri.⁴⁶

Al-Qur’an menggunakan beberapa kata untuk menggambarkan kemiskinan, antara lain dengan kata *faqir*, *miskin*, *al-sail*, dan *al-mahrum*, tetapi kata *faqir* dan *miskin* lebih sering dijumpai dalam Al-Qur’an. Di dalam Al-Qur’an kata *faqir* dijumpai 12 kali dan kata *miskin* dijumpai 25 kali, yang masing-masing

⁴⁴ Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: STIM YKPN, 2010), hlm 299

⁴⁵ Bayu Tri Cahya, Kemiskinan Ditinjau dari Perpekstif Al-Qur’an dan Hadis, *Jurnal Penelitian*, Vol. 9, No, 1, Februari 2015

⁴⁶ Nurul Huda, DKK, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta : Prenadamedia, 2015), hlm 220

digunakan dalam pengertian yang berbeda-beda. Dengan dimaknai bahwa miskin adalah suatu kondisi dimana seseorang tersebut membutuhkan pertolongan.⁴⁷

Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 155 dijelaskan bahwa:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِيرٍ

الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾

Artinya: *“Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar”*.

Dari Anas bin Malik Radhiallahu'anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda:⁴⁸

كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا

Artinya: *“Kemiskinan dapat mengakibatkan kekufuran”*

⁴⁷ Muhtadi Ridwan, *Geliat Ekonomui Islam: Memangkas Kemiskinan, Mendorong Perubahan*, (malang: UIN Maliki Press, 2012), hlm 31

⁴⁸ Hadits ini dikeluarkan oleh Imam al-Baihaqi dalam kitab “Syu’abul Imam” (no.6612), Abu Nu’aim Al-Ashbahani dalam “Hilyatul auliyaa” (3/53 dan 109), Al-Qudha’i dalam “Musnadusy Syihab” (no.586), Al’Uqaili dalam “Adh-Dhu’afaa” (no. 1979) dan Ibnu ‘Adi dalam “Al-Kamil” (7/236), dari Yaid bin Abanar-Raqa_syi, dari Anas bin Malik RA, dari Rasulullah SAW. <https://muslim.or.id/18982-hadits-lemah-hampir-hampir-kemiskinan-itu-menjadi-kekafiran.html> (diakses tanggal 1 September 2018: jam 00.15)

2.2.2. Jenis-Jenis Kemiskinan

Kemiskinan mempunyai makna yang luas dan memang tidaklah mudah untuk mengukurnya.⁴⁹

1. Kemiskinan Absolut

Pada dasarnya, konsep kemiskinan seringkali dikaitkan dengan sebuah perkiraan atas tingkat pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan atas tingkat kebutuhan biasanya hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk dapat hidup secara layak. Jika pendapatan tidak dapat mencapai kebutuhan minimum, maka orang dapat dikatakan miskin. Dengan demikian, kemiskinan dapat pula kita ukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dan tidak miskin atau sering disebut sebagai garis batas kemiskinan. Konsep ini sering disebut dengan kemiskinan absolut.

Kesulitan utama dalam perhitungan konsep kemiskinan absolut adalah menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum, karena kedua hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh adat kebiasaan saja, namun juga oleh iklim, tingkat kemajuan suatu negara, dan berbagai faktor ekonomi lainnya. Meskipun demikian seseorang membutuhkan barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan fisik.

⁴⁹ Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: STIM YKPN, 2010), hlm 301

Kebutuhan dasar itu sendiri terbagi dalam dua golongan, yaitu (1) kebutuhan dasar yang diperlukan untuk mempertahankan hidupnya (kebutuhan subsisten), dan (2) kebutuhan lainnya yang lebih tinggi. Di sisi lain, UNRISD (*United National Research Institute for Social Development*) menggolongkan kebutuhan dasar manusia ke dalam tiga kelompok utama yaitu: (1) kebutuhan fisik primer, yang terdiri dari kebutuhan gizi, perumahan dan kesehatan; (2) kebutuhan kultural, yang terdiri dari pendidikan, waktu luang, dan rekreasi serta ketenangan hidup; dan (3) kebutuhan yang muncul karena adanya surplus pendapatan, sehingga kemudian muncul sebuah keinginan untuk mencapai kebutuhan lain yang lebih tinggi tingkatnya.

2. Kemiskinan relatif

Orang yang sudah mempunyai tingkat pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum tidak selalu berarti orang tersebut “tidak miskin”. Beberapa pakar berpendapat bahwa meskipun pendapatan seseorang sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum, namun ternyata pendapatan masyarakat di sekitarnya, maka orang tersebut masih berada dalam kategori miskin. Ini terjadi karena kemiskinan lebih banyak ditentukan oleh keadaan sekitarnya, dari lingkungan orang yang bersangkutan. Konsep ini yang disebut sebagai konsep kemiskinan relatif.

Berdasarkan konsep, garis kemiskinan akan mengalami perubahan jika tingkat hidup masyarakat berubah. Hal ini jelas merupakan perbaikan dari konsep kemiskinan absolut. Konsep kemiskinan relatif bersifat

dinamis, sehingga kemiskinan akan selalu ada. Kincaid (1975) memandang kemiskinan dari aspek ketimpangan sosial. Semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah, maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan miskin. Bank Dunia mengemukakan tiga macam kriteria yang berkaitan dengan masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, yaitu; (1), jika 49 persen jumlah penduduk dengan pendapatan terendah menerima kurang dari 12 persen dari total pendapatan nasionalnya, maka dapat dikatakan bahwa distribusi pendapatannya sangat timpang; (2), jika 40 persen jumlah penduduk dengan pendapatan terendah menerima antara 12 sampai 17 persen dari total pendapatan nasionalnya, maka dapat dikatakan bahwa mereka mengalami ketidakmerataan sedang; (3), jika 40 persen jumlah penduduk dengan pendapatan terendah tersebut menerima lebih dari 17 persen dari total pendapatan nasionalnya, maka dapat dikatakan bahwa mereka mengalami ketidakmerataan rendah.

2.2.3. Indikator Kemiskinan

Ada beberapa macam ukuran yang seringkali digunakan sebagai indikator kemiskinan, antara lain: konsumsi beras per kapita per tahun, tingkat pendapatan, indeks kesejahteraan rakyat, dan indeks kemiskinan manusia⁵⁰.

1. Tingkat konsumsi beras

Sajogyo (1977) menggunakan tingkat konsumsi beras per kapita sebagai indikator kemiskinan. Untuk daerah pedesaan, penduduk dengan

⁵⁰ *Ibid*, hlm303

konsumsi beras kurang dari 240 kg per kapita per tahun dapat digolongkan sebagai penduduk miskin. Sedangkan untuk daerah perkotaan adalah 300 kg per kapita per tahun.

2. Tingkat pendapatan

Pada pendapatan garis kemiskinan antara daerah pedesaan dan perkotaan kiranya dapat dimengerti karena dinamika kehidupan yang berbeda antara keduanya. Penduduk di daerah perkotaan mempunyai kebutuhan yang relatif sangat beragam dibandingkan dengan daerah pedesaan, sehingga mempengaruhi pola pengeluaran mereka.

3. Indikator kesejahteraan rakyat

Indikator-indikator utama kemiskinan berdasarkan kutipan dari Badan Pusat Statistik, antara lain sebagai berikut⁵¹:

- a. Ketidak mampuan memenuhi konsumsi dasar (sandang, pangan dan papan)
- b. Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi)
- c. Tidak adanya jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga)
- d. Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun kelompok
- e. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam.

⁵¹ Badan Pusat Statistik

- f. Kurangnya apresiasi dalam kegiatan sosial masyarakat
- g. Tidak adanya akses dalam lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan
- h. Ketidak mampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental
- i. Ketidakmampuan dan ketergantungan sosial (anak-anak terlantas, wanita korban kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marginak dan terpencil

2.2.4. Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan dapat dipandang sebagai kondisi anggota masyarakat yang tidak atau belum turut serta dalam proses perubahan, karena tidak mempunyai kemampuan, baik kemampuan dalam kepemilikan faktor produksi maupun kualitas faktor produksi yang memadai, sehingga tidak mendapatkan manfaat dari hasil proses pembangunan. Ketidak ikut sertaan dalam proses pembangunan ini dapat disebabkan karena secara alamiah mereka tidak atau belum mampu mendayagunakan faktor produksi yang mereka miliki. Pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah terkadang tidak sesuai dengan kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk berpartisipasi, hal tersebut berakibat manfaat pembangunan juga tidak dapat menjangkau mereka.⁵²

⁵²Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: STIM YKPN, 2010), hlm 300

2.2.5. Dampak Kemiskinan

Rincian dampak yang terjadi akibat adanya kemiskinan, yaitu⁵³:

1. Banyaknya pengangguran
2. Terciptanya perilaku kekerasan. Ketika seseorang tidak lagi mampu mencari penghasilan melalui jalan yang benar dan halal dan ketika mereka merasa tidak sanggup lagi bertahan dan menjaga keberlangsungan hidupnya maka jalan pintas pun dilakukan
3. Banyak anak yang tidak mengenyam pendidikan. Biaya pendidikan yang tinggi membuat masyarakat miskin tidak lagi mampu menjangkau dunia sekolah dan pendidikan
4. Susahnya mendapatkan pelayanan kesehatan. Biaya pengobatan yang tinggi membuat masyarakat miskin memutuskan untuk tidak berobat. Sehingga, mereka sama sekali tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.

Dampak-dampak yang disebutkan secara umum, dapat digeneralisir dalam beberapa aspek, yaitu⁵⁴:

- a. Aspek kependudukan

Dilihat dari segi kependudukan, kemiskinan berdampak pada ketidak merataan pertumbuhan penduduk di setiap wilayah sehingga ketidak merataan tersebut membawa konsekuensi berat kepada aspek-aspek kehidupan sosial lainnya. Secara nasional

⁵³ Mubyarto, *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, (Yogyakarta: Aditiya Media, 1999), hlm.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 21-30

penduduk yang tidak merata membawa akibat bagi penyediaan berbagai sarana dan kebutuhan penduduk. Dalam bidang lapangan pekerjaan terjadi ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dengan pertumbuhan lapangan kerja dan pada akhirnya menimbulkan pengangguran baik secara tersembunyi ataupun pengangguran secara terbuka.

b. Aspek ekonomi

Masalah ekonomi menyangkut masalah kerumahtanggaan penduduk dalam memenuhi kebutuhan materinya. Masalah ini terbagi kedalam beberapa aspek yaitu aspek kuantitas, kualitas penduduk, sumber daya alam dan manusia, komunikasi dan transportasi, kondisi dan lokasi geografi. Ditinjau dari segi kuantitas penduduk Indonesia merupakan penduduk yang memiliki kekuatan ekonomi yang bisa dikembangkan terutama dengan jumlah penduduk yang banyak. Tapi kemiskinan menjadikan penduduk tidak memiliki kekuatan dalam mengembangkan perekonomian Indonesia. Kemudian kemiskinan menjadikan penduduk seolah menunjukan kelemahannya sebagai konsumen berbagai produksi.

c. Aspek lingkungan

Masalah lingkungan dapat diartikan bahwa masalah yang terjadi di lingkungan hidup manusia mengancam ketentraman dan kesejahteraan manusia yang disebabkan oleh ketidakseimbangan

antara komponen manusia dengan lingkungan yang menjadi penampung dan penjamin kehidupan manusia. Dampak lainnya yaitu keterbelakangan pembangunan, kebodohan, banjir, pencemaran lingkungan dan tingkat kesehatan yang rendah yang diakibatkan karena lingkungan yang kurang mendukung karena kemiskinan.

d. Aspek pendidikan

Pendidikan secara luas merupakan dasar pembentukan kepribadian, kemajuan ilmu, kemajuan teknologi dan kemajuan kehidupan sosial pada umumnya. Dampak kemiskinan terhadap pendidikan memang sangat merugikan sekali karena telah menghilangkan pentingnya pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga tidak sedikit penduduk Indonesia yang belum mengenal pendidikan.

e. Pemberontakan

Pemberontakan merupakan bentuk kekecewaan dari masyarakat terhadap pemerintah yang dinilai telah gagal menciptakan kesejahteraan rakyat, perang saudara antar-etnis, golongan, ideologi demi sebuah kekuasaan dan untuk menguasai kekuasaan, dan lainnya. Semua itu tidak terlepas dari usaha masyarakat untuk melakukan perubahan nasibnya agar menjadi lebih baik dari keadaan kemiskinan yang menyimpannya.

Pemberontakan seperti itu biasanya terjadi di negara berkembang atau negara miskin.

2.3. Pengeluaran Pemerintah

2.3.1. Pengertian Pengeluaran Pemerintah

Pada saat ini secara universal bahwa dalam rangka mengatasi sifat kaku yang melekat di negara terbelakang, pemerintah harus memegang peran aktif bukan berlaku sebagai penonton pasif.⁵⁵ Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu aspek penggunaan sumber daya ekonomi yang secara langsung dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah dan secara tidak langsung dimiliki oleh masyarakat melalui pembayaran pajak. Di Indonesia, pengeluaran pemerintah dapat dibedakan menurut dua klasifikasi, yaitu⁵⁶:

1. Pengeluaran rutin pemerintah

yaitu pengeluaran untuk pemeliharaan atau penyelenggaraan pemerintah sehari-hari. Termasuk dalam pengeluaran rutin adalah: belanja pegawai, belanja barang, subsidi daerah otonom, bunga dan cicilan utang dan lain-lain.

Anggaran belanja rutin memegang peran yang penting untuk menunjang kelancaran mekanisme sistem pemerintah serta upaya peningkatan efisiensi dan produktivitas, yang pada gilirannya akan menunjang tercapainya sasaran dan tujuan setiap tahap pembangunan.

⁵⁵ M.L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm 431

⁵⁶ Hera Susanti, Moh. Ikhsan, Widyanti. *Indikator-indikator makroekonomi*. (jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1995), hlm 61

Penghematan dan efisiensi pengeluaran rutin perlu dilakukan untuk menambah besarnya tabungan pemerintah yang diperlukan untuk biaya pembangunan nasional. Penghematan dan efisiensi tersebut antara lain dapat diupayakan melalui penajaman alokasi pengeluaran rutin, pengendalian dan koordinasi pelaksanaan pembelian barang dan jasa kebutuhan departemen/lembaga negara non departemen, dan pengurangan berbagai macam subsidi secara bertahap.

2. Pengeluaran pembangunan

yaitu pengeluaran untuk pembangunan, baik fisik, seperti jalan, jembatan, gedung-gedung dan pembelian kendaraan, maupun pembangunan non fisik spiritual seperti misalnya penataran, training dan sebgainya.

Pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran yang ditunjukkan untuk membiayai program-program pembangunan, sehingga anggaran selalu disesuaikan dengan dana yang berhasil dimobilisasi. Dana ini kemudian dialokasikan pada berbagai bidang sesuai dengan prioritas yang direncanakan dalam repelita. Selain membiayai pengeluaran sektoral melalui departemen/lembaga , pengeluaran pembangunan juga membiayai proyek-proyek khusus daerah, yang dikenal sebagai proyek ipres (intruksi presiden), baik yang dilaksanakan oleh pusat maupun masing-masing daerah. Proyek-proyek inpres ini terdiri dari bantuan pembangunan desa, bantuan pembangunan dari II, bantuan pembangunan dari, inpres sekolah dasar, inpres kesehatan, inpres pemugaran pasar, inpres penghijauan dan

inpres jalan/jembatan. Selain itu, dilaksanakan proyek-proyek yang dihasilkan oleh hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang penentunya diserahkan kepada daerah. Besarnya alokasi anggaran untuk bantuan pembangunan daerah dipengaruhi oleh kemampuan keuangan negara serta beberapa faktor yang disesuaikan dengan masing-masing wilayah, seperti banyaknya penduduk dan luas wilayah.

Ada tiga yang mendasari pemerintah melakukan intervensi dalam perekonomian, yaitu.⁵⁷:

a. *Public Interest Theory*

Menurut teori kepentingan publik dari pemerintah aktivitas pemerintah adalah ditunjukan untuk memaksimalkan kebutuhan masyarakat. Sudut pandang kepentingan publik inilah yang menjadi dasar bagi Keynesian untuk merumuskan suatu kebijakan.

b. *Capture Theory*

Intervensi pemerintah terjadi karena adanya spesial *interest group* yang mendominasi pemerintah, bertolak belakang dengan *public interest theory*, menyatakan bahwa aktivitas pemerintah ditunjukan untuk keuntungan dan memaksimalkan kesejahteraan dari *special interest group* tersebut.

⁵⁷ Christina Usmalidanti, “ Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2009”, *Skripsi*, (Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 45 (diterbitkan)

c. *Public Choice Theory*

Ialah berdasarkan pada kenyataan bahwa pemerintah tidak lebih merupakan kumpulan dari banyak orang atau individu yang bekerja untuk pemerintah, masing-masing individu mencoba memaksimalkan kepentingannya. Dalam sudut pandang ini pemerintah adalah sebuah organisasi yang kompleks yang terdiri dari banyak individu, masing-masing dengan tujuan yang berbeda.

2.3.2. Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.⁵⁸ Teori pengeluaran pemerintah.

a. Teori Wagner

Teori ini menekankan pada perkembangan persentase pengeluaran pemerintah semakin besar terhadap GNP. Menurut Wagner apabila suatu perekonomian pendapatan per kapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah akan ikut meningkat, terutama karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan dan sebagainya.

⁵⁸ Guritno Mangkoesebroto, *Ekonomi Publik*, (Yogyakarta:BPFE, 1993), hlm 169

b. Teori Peacock dan Wiseman

Teori ini memandang bahwa pemerintah selalu berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar, sehingga teori Peacock dan Wiseman merupakan dasar dari pemungutan suara.⁵⁹

c. Teori makro

- 1) Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa
- 2) Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai; perubahan gaji pegawai mempunyai pengaruh terhadap proses makro ekonomi, di mana perubahan gaji pegawai akan mempengaruhi tingkat permintaan secara tidak langsung.
- 3) Pengeluaran pemerintah untuk *transfer payment*; bukan pembelian barang dan jasa oleh pemerintah dipasar barang melainkan mencatat pembayaran atau pemberian langsung kepada warganya yang meliputi misalnya pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran pensiun, pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat. Secara ekonomi *transfer payment* mempunyai status dan pengaruh yang sama dengan pos gaji pegawai meskipun secara administrasi keduanya berbeda.⁶⁰

⁵⁹ Septiana M.M. Sanggelorang, Vekie A. Rumat, dan Hanly F.DJ. Siwu, "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara", *Jurnal Berkah Ilmiah*, Vol. 15 No. 2, Juli 2015

⁶⁰ Christina Usmalidanti, " Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi

d. Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan

Proporsi pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan, baik terhadap total pengeluaran pembangunan maupun PDB, secara tidak langsung menunjukkan reaksi pemerintah atas semakin tingginya permintaan atas sarana dan prasarana pendidikan.⁶¹

e. Pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan

Besarnya pengeluaran pemerintah untuk sub-sektor kesehatan menunjukkan seberapa jauh prioritas alokasi dan pemerintah untuk sub-sektor kesehatan. Pada umumnya yang dilihat adalah besarnya rasio antara pengeluaran untuk sektor kesehatan terhadap total pengeluaran bangunan dan terhadap PDB.⁶²

Konsep pengeluaran pemerintah merupakan nilai pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Pengeluaran untuk menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, pengeluaran untuk menyediakan polisi dan tentara, pengeluaran gaji untuk pegawai pemerintah dan pengeluaran untuk mengembangkan infrastruktur dibuat untuk kepentingan masyarakat. Klasifikasi pengeluaran pemerintah menurut Suparmoko (1996)⁶³:

Jawa Tengah Tahun 2007-2009”, *Skripsi*, (Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 39-40 (diterbitkan)

⁶¹ Hera Susanti, Moh. Ikhsan, Widyanti. *Indikator-indikator makroekonomi*. (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1995), hlm 112

⁶² *Ibid*, hlm 102

⁶³ Christina Usmalidanti, “ Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2009”, *Skripsi*, (Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 38 (diterbitkan)

- a. pengeluaran pemerintah merupakan investasi untuk menambahkan kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa yang akan datang
- b. pengeluaran pemerintah langsung memberikan kesejahteraan bagi masyarakat
- c. pengeluaran pemerintah merupakan pengeluaran yang akan datang
- d. pengeluaran pemerintah merupakan sarana penyediaan kesempatan kerja yang lebih banyak dan penyebaran daya beli lebih luas.

2.3.3. Peran Pemerintah

Peran pemerintah dalam sebuah negara merupakan kunci utama untuk membuat kebijakan dalam perekonomian. Peran pemerintah daerah adalah upaya dalam melaksanakan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang didasarkan pada pertimbangan bahwa daerah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya. Melalui kebijakan ini diharapkan dapat memacu peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi.⁶⁴ Menurut pakar ekonomi syari'ah Prof. Ataul Huq Pramanik, peran pemerintah dalam perekonomian ada 3 (tiga) yaitu:⁶⁵

- a. *ideological Role* (peran ideologi)
- b. *development role* (peran pembangunan)
- c. *welfare role* (peran kesejahteraan)

⁶⁴ Denni Sulistio Mirza, "Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah tahun 2006-2009", *Economics Development Analysis Journal*, Vol. 1 No. 1 2012, hlm 4

⁶⁵ Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyanti, *Ekonomi Pembangunan Syari'ah, edisi revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm 109

2.3.4. Peran pendidikan dan kesehatan dalam pembangunan manusia

penyediaan pelayanan pendidikan sangatlah penting, hampir disemua negara maju mengutamakan pendidikan sehingganya SDM yang baik akan menghasilkan negara yang maju. Seperti dikatakan Mydral “*untuk memulai program pembangunan nasional sambil membiarkan sebagian besar penduduk tetap buta huruf kelihatnya bagi saya akan menjadi sia-sia*”.⁶⁶ Perkataan tersebut mencerminkan bahwa pendidikan sangatlah penting dalam sebuah pembangunan. Ketika ada masyarakat yang masih minimum akan pendidikan maka dikatakan pembangunan yang dilakukan akan sia-sia dan tidak bermanfaat.

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa seberapa penting peran pemerintah dalam menyediakan sarana pendidikan sehingga masyarakat dapat menikmati sarana dan prasarana tersebut. Bentuk sarana tersebut bisa berupa tempat pendidikan, lembaga maupun subsidi pendidikan melalui beasiswa bagi siswa kurang mampu.

Adapun sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan juga salah satu kebutuhan pokok yang dapat perhatian. Karena jika pemenuhan kesehatan masyarakat terpenuhi dengan mudah, maka hal ini akan berimplikasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kemajuan pembangunan secara keseluruhan. Selain itu, kesehatan merupakan salah satu kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kesehatan adalah hak bagi setiap warga masyarakat yang

⁶⁶ G. Mydral, *An International Economy-Problem and Prospect*, hlm 186, dikutip oleh M.L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm 435

dilindungi Undang-undang Dasar. Perbaikan pelayanan kesehatan merupakan suatu investasi SDM untuk mencapai masyarakat yang sejahtera.⁶⁷

Berdasarkan keterangan tersebut bahwa penyediaan serta perbaikan pelayanan publik terutama sektor pendidikan dan kesehatan harus menjadi titik fokus pemerintah sehingga dapat menghasilkan masyarakat yang sejahtera.

2.4. Pendapatan Perkapita

2.4.1. Pengertian

Pendapatan adalah suatu aliran penerimaan yang dapat dikonsumsi tanpa mengurangi nilai sumber yang menciptakan aliran penerimaan tersebut.⁶⁸

Pendapatan perkapita menurut Sadono Sukirno adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu, yang biasanya satu tahun. Pendapatan perkapita bisa juga diartikan sebagai jumlah dari nilai barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu. Pendapatan perkapita diperoleh dari pendapatan nasional pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk suatu negara pada tahun tersebut.

Pendapatan perkapita dalam analisis pembangunan ekonomi adalah menggambarkan jurang tingkat kemakmuran diberbagai negara. Dalam konteks ini diasumsikan tingkat kemakmuran tingkat kemakmuran suatu negara

⁶⁷ Adi Widodo, Waridin dan Johanna Maria K, "Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Pengetasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah", *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Vol 1, No 1 (Juli 2011)

⁶⁸ Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus, *Mikro Ekonomi*, (Jakarta : Erlangga, 1992), hlm 135

direfleksikan oleh pendapatan rata-rata yang diterima penduduknya. Semakin tinggi pendapatan tersebut semakin tinggi daya beli penduduk, dan daya beli bertambah ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁶⁹

2.4.2. Jenis-jenis Pendapatan

Pada bagian sebelumnya kita dapat memahami pendapatan perkapita, maka disini juga terdapat jenis-jenis dari pendapatan tersebut adapun diataranya sebagai berikut.⁷⁰

1. Pendapatan Pribadi

Pendapatan pribadi dapat diartikan sebagai semua jenis pendapatan termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan sesuatu kegiatan apapun, yang diterima oleh penduduk suatu negara. Dari arti istilah pendapatan pribadi ini dapatlah disimpulkan bahwa dalam pendapatan pribadi telah termasuk juga pembayaran pindahan. Pembayaran tersebut merupakan pemberian-pemberian yang dilakukan oleh pemerintah kepada berbagai golongan masyarakat dimana para penerimanya tidak perlu memberikan suatu balas jasa atau usaha apapun sebagai imbalan.

2. Pendapatan *Disposebel*

Apabila pendapatan pribadi dikurangi oleh pajak yang harus dibayar oleh para penerima pendapatan, nilai yang tersisa dinamakan

⁶⁹ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Modern*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 11-12

⁷⁰ Sadono Sukirno, *Teori Pengantar Makro Ekonomi*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 47

pendapatan *disposebel*. Dengan demikian pada hakikatnya pendapatan *disposebel* adalah pendapatan yang dapat digunakan oleh para penerimanya, yaitu semua rumah tangga yang ada dalam perekonomian, untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa yang mereka ingin.

2.4.3. Metode Perhitungan Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita adalah jumlah pendapatan rata-rata penduduk dalam sebuah negara pada suatu periode tertentu. Biasanya, dihitung setiap periode satu tahun, untuk mendapatkan jumlah pendapatan rata-rata penduduk, pendapatan nasional dihitung dari jumlah seluruh pendapatan penduduk negara tersebut.

Oleh karena itu, jumlah penduduk praktis akan mempengaruhi jumlah pendapatan perkapita suatu negara. Pendapatan perkapita dapat juga diartikan sebagai jumlah nilai barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi setiap penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu (biasanya 1 tahun).

Cara menghitung pendapatan perkapita adalah menjumlahkan pendapatan seluruh penduduk suatu negara pada tahun tertentu. Kemudian, dibagi dengan jumlah penduduk negara yang bersangkutan pada periode tahun yang sama, jika di formulakan sebagai berikut:

$$GDP \text{ Perkapita} = \frac{PDB \text{ (Produc Domestic Bruto)}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

2.4.4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Perkapita

Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan perkapita adalah sebagai berikut:⁷¹

1. Permintaan agregat dan penawaran agregat

Permintaan agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan permintaan terhadap barang-barang dan jasa sesuai dengan tingkat harga. Permintaan agregat adalah seluruh barang-barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor-sektor ekonomi pada tingkat harga, sedangkan penawaran agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan penawaran barang-barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan dalam tingkat harga.

2. Konsumsi dan tabungan

Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam satu tahun. Sedangkan tabungan bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Tabungan, konsumsi, dan pendapatan sangat erat hubungannya. Hal ini dapat kita lihat dari pendapatan Keynes yang dikenal dengan *psychological consumption* yang membahas tingkat laku masyarakat dalam konsumsi jika dihubungkan dengan pendapatan.

⁷¹ Suherman Rasyid, *Pengantar Teori Ekonomi*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 166

3. Investasi

Pengeluaran untuk investasi merupakan salah satu komponen penting pengeluaran agregat.

2.4.5. Pandangan Islam Terhadap Pendapatan Perkapita

Pandangan menurut Islam pendapatan merupakan segala sesuatu yang diperoleh manusia sebagai balas jasa yang diperoleh manusia sebagai akibat balas jasa yang telah diberikan. Dalam islam pemberian balas jasa dari pekerjaan yang dilakukan bersifat halal, tidak termasuk misalnya pendapatan akibat menjual barang-barang haram.

Syariat Islam menginginkan manusia untuk mencapai dan memelihara kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. oleh karena itu, manusia diwajibkan untuk memperoleh pendapatan agar kebutuhan-kebutuhan manusia dapat terpenuhi dengan syarat pendapatan yang diperoleh merupakan pendapatan yang bersumber dari pekerjaan yang halal.

Menurut Islam, pendapatan perkapita yang tinggi bukan satu-satunya komponen pokok yang menyusun kesejahteraan.⁷² Pendapatan perkapita hanya merupakan *necessary condition* (kondisi yang mencukupi). Maksudnya, merupakan suatu kondisi yang tidak dapat diabaikan untuk pencapaian suatu tujuan. Suatu kondisi yang perlu biasanya digunakan sebagai istilah imbang dari kondisi yang cukup (*sufficient condition*) yang dipandang sebagai kelayakan dari suatu kondisi untuk mencapai tujuan. Islam menggunakan parameter falah,

⁷² Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam : Pendekatan Teoritis*, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm 28

yaitu kesejahteraan yang haqiqi, kesejahteraan yang sebentar besarnya dimana komponen-komponen rohaninya masuk ke dalam pengertian falah.

Selain harus memasukan unsur falah dalam menganalisa kesejahteraan, perhitungan pendapatan nasional dalam islam juga mampu mengenali bagaimana instrumen-instrumen waqaf, zakat, sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan. Pada intinya ekonomi dalam islam mengukur kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sistem moral dan sosial islam.⁷³ maka dapat dijelaskan dalam ayat dibawah ini.

2.4.6. Manfaat Perhitungan Pendapatan Perkapita

Kemampuan pendapatan perkapita dalam mengukur tingkat kesejahteraan negara dan sebagai indikator kehidupan negara dapat dijadikan sebagai salah satu analisis ekonomi bagi pemerintah maupun organisasi ekonomi untuk mengambil kebijakan ekonomi.

Secara ringkas dapat disimpulkan beberapa manfaat dari perhitungan pendapatan perkapita yaitu:

1. Mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara dari waktu ke waktu
2. Membandingkan tingkat kesejahteraan antar negara satu dengan yang lainnya
3. Sebagai pedoman bagi pemerintah dan membuat kebijakan ekonomi

⁷³ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam : Pendekatan Teoritis*, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm 28-29

4. Mengelompokan sebagai negara ke beberapa tingkat pendapatan

2.5. Penelitian Terdahulu

Hadi Sasana (2012), dalam jurnal yang berjudul “*Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah dan Pendapatan Perkapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah)*”. Populasi dalam penelitian terdiri dari 29 Kabupaten/Kota tingkat Provinsi Jawa Tengah dalam periode 2006-2008. Analisis data dilakukan dengan menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM) dengan program perangkat lunak Eviews. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pengeluaran pemerintah pertama memiliki efek positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota tingkat Provinsi Jawa Tengah. Kedua pendapatan perkapita belum berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota tingkat Provinsi Jawa Tengah.⁷⁴

Ajeng Pradesti Amanda Putri (2015), yang berjudul, “*Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Publik Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2013*”. Data yang digunakan adalah data sekunder, dengan populasi 35 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010-2013 dan menggunakan metode regresi data panel dengan program eviews 8 sebagai alat pengelola. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM (indeks pembangunan manusia). Sedangkan untuk pengeluaran

⁷⁴ Hadi Sasana, “Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah dan Pendapatan Perkapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah)”, *Jurnal Media Ekonomi dan Manajemen*, Vol 25. No 1 Januari 2012.

pemerintah sektor infrastruktur berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap IPM (indeks pembangunan manusia).⁷⁵

Ezra Valentino Calvin Suban (2017), berjudul “*Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Publik Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia 2007-2015*”. Penelitian ini menggunakan sampel 33 Provinsi di Indonesia dan menggunakan periode selama 5 tahun yaitu tahun 2010-2015. Pengujian dilakukan dengan melakukan regresi data panel dengan *fixed effect model* dan *stochastic analysis frontier* untuk melihat perbandingan antara SiLPA dengan efisiensi anggaran. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, kesehatan dan lingkungan hidup berpengaruh terhadap IPM sementara sektor perumahan, sektor pertanian, sektori energi & sumber daya mineral dan efisiensi anggaran tidak berpengaruh terhadap IPM.⁷⁶

Ana Mei Rafika (2017), berjudul “*Pengaruh Belanja Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia Se-Indonesia*”. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan data sekunder. Sampel penelitian adalah 212 Kabupaten/Kota untuk tahun 2011-2013. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis dengan metode regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah menurut fungsi pendidikan, realisasi

⁷⁵ Ajeng Pradesti Amanda Putri, “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Publik Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2013”, *Skripsi*, (Yogyakarta : Program Studi Ilmu Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, 2015), (diterbitkan)

⁷⁶ Ezra Valentino Calvin Suban, “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Publik Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia 2007-2015”, *Skripsi*, (Yogyakarta : Departemen Ilmu Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, 2017), (diterbitkan)

belanja daerah menurut fungsi kesehatan, realisasi belanja daerah menurut fungsi ekonomi atas dasar harga konstan berpengaruh positif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.⁷⁷

Nursiah Chalid dan Yusbar Yusuf (2014), jurnal yang berjudul "*Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di provinsi Riau*". Data yang digunakan adalah data panel tahun 2006-2011 menurut daerah tingkat II Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Analisis data menggunakan regresi linier berganda. Dari hasil penelitian diketahui tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran berpengaruh negatif terhadap indeks pembangunan manusia, masing-masing dengan koefisien regresi sebesar -0,163 dan -0,084. Upah minimum Kabupaten/Kota dan laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia, dengan koefisien regresi masing-masing 0,005 dan 0,953.⁷⁸

Khoirul Fikri T (2016), berjudul "*Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Tahun 2004-2013*". Penelitian ini mengestimasi pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. Penelitian ini menggunakan 33 Provinsi di Indonesia dan menggunakan periode

⁷⁷ Ana Mei Rafika, "Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Se-Indonesia", *Skripsi*, (Bandar Lampung : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, 2017), (diterbitkan)

⁷⁸ Nursiah Chalid dan Yusbar Yusuf, "Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di provinsi Riau", *Jurnal Ekonomi, Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Riau*, Vol 22, No 2 Juni 2014

10 tahun. Pengujian dilakukan dengan menggunakan data panel dengan *fixed effect model*. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia, sedangkan pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan dan infrastruktur berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia Indonesia.⁷⁹

Risanda Alirasta Budiantoro (2017), berjudul “*Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pertumbuhan ekonomi dan Alokasi APBD bidang Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia, 2011-2015*”. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan metode *fixed effect*. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari 33 Provinsi di Indonesia dalam kurun waktu 2011-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Indonesia. Kemudian, variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap IPM di Indonesia, hal ini terjadi karena pertumbuhan ekonomi Indonesia rendah dan belum berkualitas. Untuk alokasi APBN dalam bidang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Indonesia, alokasi APBD dalam bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Indonesia.⁸⁰

⁷⁹ Khoirul Fikri T. “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Tahun 2004-2013”, *Skripsi*, (Yogyakarta : Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, 2016), (diterbitkan)

⁸⁰ Risanda Alirasta Budiantoro, “Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pertumbuhan ekonomi dan Alokasi APBD bidang Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia, 2011-2015”, *Skripsi*, (Yogyakarta : Departemen Ilmu Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, 2017), (diterbitkan)

Devyanti Patta (2012), berjudul “*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan Periode 2001-2010*”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linier berganda (OLS), dengan data *time series* selama periode 2001-2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi (PDRB), pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Sulawesi Selatan. Sedangkan persentase penduduk miskin dan ketimpangan distribusi pendapatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Sulawesi Selatan.⁸¹

Neng Sinta Lela Sari (2017), berjudul “*Analisis Pengaruh Pendapatan Perkapita, Pengeluaran Pemerintah Daerah, Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) dan Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2009-2015*”. Model analisis data yang digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel digunakan analisis data panel menggunakan pendekatan *fixed effect*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pendapatan perkapita dan pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2009-2015 sedangkan gini ratio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks

⁸¹ Devyanti Patta, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan Periode 2001-2010”, *Skripsi*, (Makasar : Fakultas Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin, 2012), (diterbitkan)

pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2009-2015.⁸²

Aris Setia Budi (2017), berjudul “*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dan Perimbangan dan Belanja Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2012-2014*”. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia pada pemerintahan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, dana alokasi umum (DAU) berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia pada pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2012-2014, dana alokasi khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia, dana bagi hasil (DBH) tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia, belanja daerah (BD) berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia pada pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2012-2014.⁸³

⁸² Neng Sinta Lela Sari, berjudul “Analisis Pengaruh Pendapatan Perkapita, Pengeluaran Pemerintah Daerah, Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) dan Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2009-2015”, *Skripsi*, (Bandung : Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan, 2017), (diterbitkan)

⁸³ Aris Setia Budi, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dan Perimbangan dan Belanja Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2012-2014”, *Skripsi*, (Surakarta : Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islama Negeri Surakarta, 2017), (diterbitkan)

Tabel 2.2
Tabel Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Universitas/Institut	Judul Penelitian	Metode dan hasil
1	Hadi Sasana (2012)	Jurnal Media Ekonomi dan Manajemen	pengaruh belanja pemerintah daerah dan pendapatan perkapita terhadap indeks pembangunan manusia (studi kasus di kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah)	. Analisis data dilakukan dengan menggunakan <i>Fixed Effect Model</i> (FEM) dengan program perangkat lunak Eviews. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pengeluaran pemerintah pertama memiliki efek positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Kedua pendapatan perkapita belum berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia
2	Khoirul Fikri T	Universitas Gadjah Mada	Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia Indonesia tahun 2004-2013	Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi data panel model efek tetap (<i>Fixed Effect Model</i>). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia dengan 33

				Provinsi, sedangkan pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan dan infrastruktur berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.
3	Ajeng Pradesti Amanda Putri (2015)	Universitas Gadjah Mada	Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah sektor publik terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2013	menggunakan metode regresi data panel dengan program <i>eviews</i> 8 sebagai alat pengelola. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM (indeks pembangunan manusia). Sedangkan untuk pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap IPM (indeks pembangunan manusia)
4	Ezra Valentino Calvin Suban (2017)	Universitas Gadjah Mada	Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor publik terhadap indeks	Pengujian dilakukan dengan melakukan regresi data panel dengan <i>fixed effect model</i> dan <i>stochastic analysis frontier</i> untuk melihat perbandingan antara SiLPA dengan

			pembangunan manusia di Indonesia 2007-2015	efisiensi anggaran. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, kesehatan dan lingkungan hidup berpengaruh terhadap IPM sementara sektor perumahan, sektor pertanian, sektori energi & sumber daya mineral dan efisiensi anggaran tidak berpengaruh terhadap IPM
5	Ana Mei Rafika (2017)	Universitas Lampung	Pengaruh Belanja Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia Se-Indonesia	.Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis dengan metode regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah menurut fungsi pendidikan, realisasi belanja daerah menurut fungsi kesehatan, realisasi belanja daerah menurut fungsi ekonomi atas dasar harga konstan berpengaruh positif signifikan terhadap IPM
6	Nursiah	Jurnal Ekonomi, Ju	Pengaruh	Analisis data menggunakan

	Chalid dan Yusbar Yusuf (2014)	rusan Ilmu Ekonomi Universitas Riau	Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di provinsi Riau	regresi linier berganda. Dari hasil peneliti diketahui tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran berpengaruh negatif terhadap indeks pembangunan manusia, masing-masing dengan koefies regresi sebesar -0,163 dan -0,084. Upah minimum Kabupaten/Kota dan laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia, dengan koefisien regrei masing-masing 0,005 dan 0,953
7	Risanda Alirasta Budiantoro (2017)	Universitas Gadjah Mada	Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pertumbuhan ekonomi dan Alokasi APBD bidang Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia,	Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan metode <i>fixed effect</i> . Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Kemudian, variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap IPM. Untuk alokasi APBN dalam bidang pendidikan

			2011-2015	berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Indonesia, alokasi APBD dalam bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM
8	Devyanti Patta (2012)	Universitas Hasanuddin	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan Periode 2001-2010	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linier berganda (OLS), Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi (PDRB), pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM). Sedangkan persentase penduduk miskin dan ketimpangan distribusi pendapatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM).
9	Neng Sinta Lela Sari (2017)	Universitas Pasundan	Analisis Pengaruh Pendapatan Perkapita,	Model analisis data yang digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel digunakan analisis data panel

			<p>Pengeluaran Pemerintah Daerah, Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) dan Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2009-2015</p>	<p>menggunakan pendekatan <i>fixed effect</i>. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pendapatan perkapita dan pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, sedangkan gini ratio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM</p>
10	Aris Setia Budi (2017)	Institut Agama Islama Negrei Surakarta	<p>Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dan Perimbangan dan Belanja Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada</p>	<p>Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap IPM, dana alokasi umum (DAU) berpengaruh terhadap IPM, dana alokasi khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan</p>

			Pemerintah Kabupaten/Kot a di Jawa Tengah tahun 2012-2014	manusia, dana bagi hasil (DBH) tidak berpengaruh terhadap IPM, belanja daerah (BD) berpengaruh terhadap IPM.
--	--	--	--	--

2.6. Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara, yang masih perlu diuji kebenarannya melalui fakta-fakta. Pengujian hipotesis dengan menggunakan dasar fakta yang diperlukan suatu alat bantu, dan sering digunakan adalah analisis statistik.⁸⁴ Jadi hipotesis ialah hubungan antara dua variabel yang diperkirakan ada. Hipotesis merupakan dugaan yang mungkin benar dan mungkin juga salah, hipotesis akan ditolak jika salah, dan akan diterima jika fakta membenarkan.⁸⁵

1. Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan indeks pembangunan manusia (IPM) berhubungan satu sama lain. Seperti yang telah dijelaskan tentang penyebab kemiskinan utama, yaitu 1) rendahnya tingkat kesehatan; 2) rendahnya pendapatan; dan 3) rendahnya tingkat pendidikan. Hubungan tersebut jelas bahwa penyebab kemiskinan merupakan bagian dari indikator IPM itu sendiri, mulai dari kesehatan sampai pendidikan. Indikator ini sangat berkaitan satu sama lain.

⁸⁴ Agus Irianto, *STATISTI: Konsep Dasar, Aplikasi, dan Pengembangannya*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm 97

⁸⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm 67

Nursiah Chalid dan Yusbar Yusuf , dalam jurnalnya yang berjudul ”Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di provinsi Riau”. Analisis data menggunakan regresi linier berganda. Dari hasil penelitian diketahui tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran berpengaruh negatif terhadap indeks pembangunan manusia, masing-masing dengan koefisien regresi sebesar -0,163 dan -0,084.⁸⁶

Dapat diuraikan menjadi hipotesis, sebagai berikut:

H₀ :Tingkat kemiskinan tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia Sumatera selatan

H₁ :Tingkat kemiskinan berpengaruh negatif terhadap indeks pembangunan manusia Sumatera Selatan

2. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Menurut Michael P. Todaro ada dua biaya pendidikan, yaitu; biaya-biaya pendidikan individual dan biaya-biaya pendidikan tidak langsung. Biaya pendidikan langsung individual ini yang kemudian berkenaan langsung pada pendapatan per kapita masyarakat. Biaya pendidikan

⁸⁶ Nursiah Chalid dan Yusbar Yusuf, “Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau”, *Jurnal Ekonomi*, Volume 22, Nomor 2 Juni 2014.

langsung individual adalah segenap biaya moneter atau uang yang harus dipikul oleh siswa dan keluarganya untuk membiayai pendidikan.⁸⁷

Merang Kahang, Muhammad Saleh, Rachmad Budi Suharto, dalam jurnalnya yang berjudul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kutai Timur” hasil analisis menunjukkan bahwa sektor pengeluaran pemerintah pendidikan secara signifikan mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Kabupaten Kutai Timur. Sektor pengeluaran pemerintah kesehatan tidak signifikan mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Kabupaten Kutai Timur. Pemerintah menunjukkan sektor pengeluaran kesehatan belum cukup menyadari dengan baik sehingga tidak cukup kuat mendongkrak indeks pembangunan manusia.⁸⁸

Dapat diuraikan menjadi hipotesis sebagai berikut:

- H₀ : Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan tidak berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia Sumatera Selatan
- H₂ : Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia Sumatera Selatan

⁸⁷ Septiana M. M. Sanggelorang, Vekie A. Rimate, dan Hanly F.Dj. Siwu, “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara”, *Jurnal Berkah Ilmiah Efisiensi*, Vol. 15 No. 02 – edisi Juli 2015

⁸⁸ Merang Kahang, Muhammad Saleh, Rachmad Budi Suharto, “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kutai Timur”, *Forum Ekonomi; Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, Volume 18, (2), 2016, ISSN print: 1411-1713, ISSN online: 2528-150X

3. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Undang-undang di Indonesia yang mengatur mengenai anggaran kesehatan adalah UU No 36 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah pusat dialokasikan minimal 5% dari APBN di luar gaji, sementara besar anggaran kesehatan pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di alokasikan Minimal 10% dari APBN di luar gaji.⁸⁹

Septiana M. M. Sanggelorang, Vekie A. Rimate, dan Hanly F.Dj. Siwu, dalam jurnalnya yang berjudul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara”, hasil regresi menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan berpengaruh positif, yaitu meningkat sebesar 0,870 dan secara statistik signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Dan variabel pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh negatif, yaitu sebesar -0,438 dan secara statistik tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Sulawesi Selatan.

Dapat diuraikan menjadi hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tidak berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia Sumatera Selatan

⁸⁹ Septiana M. M. Sanggelorang, Vekie A. Rimate, dan Hanly F.Dj. Siwu, “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara”, *Jurnal Berkah Ilmiah Efisiensi*, Vol. 15 No. 02 – edisi Juli 2015

H₂ : Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia Sumatera Selatan

4. Pengaruh Pendapatan Perkapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Neng Sinta Lela Sari, dalam skripsinya berjudul “Analisis Pengaruh Pendapatan Perkapita, Pengeluaran Pemerintah Daerah, Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) dan Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2009-2015”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pendapatan perkapita dan pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2009-2015.⁹⁰

Pendapatan perkapita suatu negara merupakan tolak ukur kemajuan dari negara tersebut, apabila pendapatan perkapita suatu negara rendah, dapat dipastikan mekanisme ekonomi masyarakat di negara tersebut mengalami penurunan, dan begitu pula sebaliknya apabila pendapatan perkapita suatu negara tinggi maka dapat dipastikan mekanisme ekonomi masyarakat tersebut mengalami peningkatan, tapi pendapatan bukan hanya didapat dari mekanisme ekonomi masyarakat saja, banyak faktor yang mempengaruhi penurunan.

⁹⁰ Neng Sinta Lela Sari, berjudul “Analisis Pengaruh Pendapatan Perkapita, Pengeluaran Pemerintah Daerah, Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) dan Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2009-2015”, *Skripsi*, (Bandung : Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan, 2017), (diterbitkan)

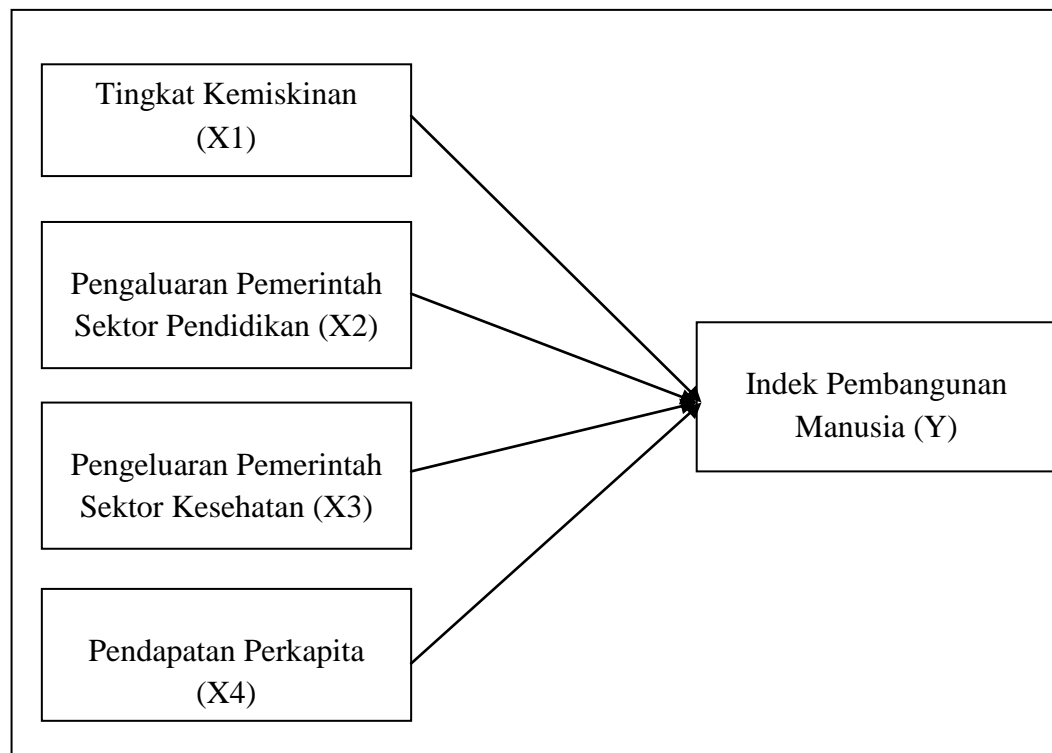
H_0 : Pengaruh Pendapatan Perkapita tidak berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia Sumatera Selatan

H_3 : Pengaruh Pendapatan Perkapita berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia Sumatera Selatan

2.7. Kerangka Berfikir

Dalam paradigma ini terdapat tiga variabel independen (X_1, X_2, X_3, X_4), dan satu variabel dependen (Y).⁹¹

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



⁹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&d* (Bandung, Alfabeta, 2016), hlm 44

Penelitian ini menganalisis pengaruh tingkat kemiskinan dan pengeluaran pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia (IPM), yang terdiri dari Tingkat Kemiskinan (X1), Pengeluaran Pemerintah sektor Pendidikan (X2), Pengeluaran Pemerintah sektor Kesehatan (X3), Pendapatan Perkapita (X4), terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y) di Sumatera Selatan. Variabel bebas (independen) dalam penelitian ini adalah tingkat kemiskinan dan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan, sedangkan variabel terikat (dependen) pada penelitian ini adalah indeks pembangunan manusia.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menguji teori-teori pengukuran variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Tujuan penelitian ini untuk menguji hipotesis penelitian yang berkaitan dengan variabel yang diteliti. Hasil pengujian data digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan penelitian, mendukung atau menolak hipotesis yang dikembangkan dari teoritis. Penelitian akan mengidentifikasi bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Ruang lingkup penelitian ini hanya pada pengaruh tingkat kemiskinan, pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan dan pendapatan pemerintah perkapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Selatan periode 2010-2016.

3.2. Jenis dan Sumber Data

3.2.1. Jenis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kuantitatif, karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik.⁹² Data yang digunakan yaitu:

⁹²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&d* (Bandung, Alfabeta, 2016), hlm 7

- a. Data Indeks Pembangunan Manusia 15 Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2010-2016
- b. Data tingkat kemiskinan 15 Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2010-2016
- c. Data pengeluaran pemerintah sektor pendidikan 15 Kab/Kota di Provinsi Sumatera selatan tahun 2010-2016
- d. Data pengeluaran pemerintah sektor kesehatan 15 Kab/Kota di Provinsi Sumatera selatan tahun 2010-2016
- e. Data pendapatan perkapita 15 Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2010-2016

3.2.2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data panel yang merupakan gabungan data runtut waktu (*time series*) adalah data yang terdiri atas suatu objek tetapi meliputi beberapa periode waktu.⁹³ Untuk tahun 2010-2016 dan data seksi silang (*cross section*) adalah data yang terdiri atas beberapa objek (misalnya data beberapa perusahaan) pada suatu waktu.⁹⁴ Untuk 15 Kabupaten/Kota. Penelitian menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁹⁵ Dalam penelitian ini data runtut waktu (*time series*) dan data seksi silang (*cross section*) dengan data sekunder diperoleh dari Badan Pusat

⁹³ Wing Wahyu Winarno, *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), hlm 2.2

⁹⁴ *Ibid*, hlm 2.4

⁹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&d* (Bandung, Alfabeta, 2016), hlm 137

Statistik Sumatera Selatan (BPS), Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) dan sumber lainnya.

3.3. Populasi dan Sampel

3.3.1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁹⁶ Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 17 Kab/Kota, yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

3.3.2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.⁹⁷ Atau suatu himpunan bagian dari populasi yang anggotanya disebut sebagai subjek, sedangkan anggota populasi disebut elemen populasi.⁹⁸ Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 15 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengumpulan sampel dengan

⁹⁶ *Ibid*, hlm 80

⁹⁷ *Ibid*, hlm 81

⁹⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm 83

pertimbangan tertentu.⁹⁹ Dengan kriteria purposive sampling dalam penelitian ini yaitu:

1. Hanya mengambil 15 Kabupaten/Kota saja yang akan diteliti alasannya karena dari ke 17 Kabupaten/Kota hanya 15 Kabupaten yang memiliki kelengkapan data yang diperlukan dalam penelitian
2. Kabupaten yang tidak termasuk PALI dan Murata mulai pemekaran pada tahun 2013
3. Tahun yang digunakan dalam penelitian ini dari tahun 2010-2016

3.4. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁰⁰ Adapun variabel-variabel dalam penelitian ini yaitu:

3.4.1. Variabel Independen

Variabel ini sering disebut sebagai variabel *stimulus*, *prediktor*, *antecedent*. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).¹⁰¹ Variabel bebas dalam penelitian ini adalah tingkat kemiskinan (X1), pengeluaran pemerintah

⁹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&d* (Bandung, Alfabeta, 2016), hlm 137

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm 38

¹⁰¹ *Ibid*, hlm 39

sektor pendidikan (X2), pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (X3) dan pendapatan pemerintah perkapita (X4).

3.4.2. Variabel Dependen

Sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.¹⁰² Variabel terikat dalam penelitian ini Indeks Pembangunan Manusia (Y)

3.5. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional merupakan definisi suatu variabel/konstruksi dengan cara memberi arti, atau memspesifikasikan kejelasan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut.¹⁰³ Variabel penelitian ini, antara lain:

1. Indeks Pembangunan Manusia

Sejak tahun 1990, *United National for Development Program* (UNDP) mengembangkan sebuah indeks kinerja pembangunan yang kini dikenal sebagai indeks pembangunan manusia atau IPM (*Human Development Indeks*).¹⁰⁴ Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara khusus mengukur capaian pembangunan manusia menggunakan komponen dasar kualitas hidup, digunakan untuk mengukur kualitas dan kesejahteraan maupun intelektualitas. serta suatu proses

¹⁰² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&d* (Bandung, Alfabeta, 2016), hlm 39

¹⁰³ Muhammad Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1999), hlm 152

¹⁰⁴ Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: STIM YKPN, 2010), hlm 46

untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia, karena fokus dari suatu negara ialah pembangunan manusia, karena manusia merupakan investasi atau aset negara yang berharga. Data IPM yang digunakan dalam penelitian ini adalah IPM 15 Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2010-2013.

2. Kemiskinan

Menurut BPS kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidak mampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar.¹⁰⁵ Dalam penelitian ini, data yang digunakan dalam penelitian adalah jumlah penduduk miskin 15 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2010-2013.

3. Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan

Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, merupakan besarnya pengeluaran pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk sektor pendidikan yang mencerminkan pengeluaran pemerintah dari total anggaran pendapatan dan belanja yang dialokasikan untuk sektro pendidikan. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah alokasi belanja pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan sektor pendidikan tahun 2010-2013.

4. Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan

Pengeluaran pemerintah atas kesehatan merupakan besarnya alokasi belanja kesehatan pemerintah yang mencerminkan pengeluaran pemerintah dari total anggaran pendapatan dan belanja yang dialokasikan untuk sektor kesehatan.

¹⁰⁵ BPS Sumatera Selatan

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah alokasi belanja pemerintah 15 Kabupaten/Kota provinsi Sumatera Selatan pada sektor kesehatan tahun 2010-2013.

5. Pendapatan Perkapita

PDRB perkapita adalah besarnya rata-rata penduduk di suatu daerah dibagi jumlah penduduk. Data yang digunakan ialah PDRB atas dasar harga konstan di 15 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2010-2016.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. bila dilihat dari datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber sekunder. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.¹⁰⁶ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan cara dokumentasi, yaitu dengan melakukan pencatatan atau mengumpulkan catatan-catatan yang menjadi bahan penelitian. Dengan semua data variabel diperoleh dari Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan dan Direktorat Jendra Perimbangan Keuangan (DJPk) dan sumber lainnya.

3.7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif. Teknik analisis ini di gunakan untuk

¹⁰⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&d* (Bandung, Alfabeta, 2016), hlm 137

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.¹⁰⁷ Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat maka digunakan analisis data panel. Data panel adalah data yang terdiri atas beberapa variabel seperti pada data seksi silang, namun juga memiliki unsur waktu seperti pada data runtut waktu.¹⁰⁸

Teknik pengolahan data menggunakan bantuan program Eviews 7.0 (*Ekonometrik Views*). Untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan dari variabel terikat terhadap variabel bebas, Analisis regresi digunakan untuk mengetahui hubungan antara suatu variabel dependen dengan variabel independen. Maka model yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda, yang dirumuskan sebagai berikut¹⁰⁹:

$$Y_i = a + b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 x_3 + e_i \dots \dots \dots (4.2)$$

Keterangan :

Y_i : Indeks Pembangunan Manusia

x_1 : tingkat kemiskinan

x_2 : pengeluaran pemerintah bidang pendidikan

x_3 : pengeluaran pemerintah bidang kesehatan

a : konstanta

b_i : koefisien regresi, merupakan besarnya perubahan variabel terikat akibat dari perubahan tiap-tiap unit variabel bebas (kemiringan

¹⁰⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&d* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm 147

¹⁰⁸ Wing Wahyu Winarno, *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), hlm 10.2

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm 4.1

e_i :standar eror

3.7.1. Estimasi Regresi dengan Data Panel

Untuk mengestimasi model dengan data panel, terdapat tiga teknik pendekatan yang terdiri dari *Common Effect*, pendekatan efek tetap (*fixed effect*), dan pendekatan efek acak (*random effect*). Teknik pendekatan mendasar yang digunakan dalam mengestimasi model regresi dengan data panel, yaitu:

3.7.1.1. Metode Common Effect/*Pooled Least Square* (PLS)

Merupakan pendekatan paling sederhana yang disebut CEM atau *pooled least square*. Hasil analisis regresi dianggap berlaku pada semua objek pada semua waktu. Kelemahan model ini adalah ketidaksesuaian model dengan keadaan yang sesungguhnya. Kondisi tiap objek berbeda, bahkan satu objek pada satu waktu akan sangat berbeda dengan kondisi objek tersebut pada waktu lain.¹¹⁰

Pada pendekatan ini diasumsikan bahwa nilai *intersep* masing-masing variabel adalah sama, begitu pula *slope* koefisien untuk semua unit *cross-section* dan *time series*. Model ini digunakan sebagai pembanding dari kedua pilihan model lainnya.

3.7.1.2. *Fixed Effect Model* (FEM)

Model yang dapat menunjukkan perbedaan konstanta antar objek, meskipun dengan koefisien regresor yang sama. Dimana *fixed effect* adalah bahwa satu objek, memiliki konstanta yang tetap besarnya untuk berbagai periode waktu.

¹¹⁰ Wing Wahyu Wiranto, *Analisis Ekonoetrika dan Statistik dengan Eviews*. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), hlm 9.14-9.15

Untuk membedakan satu objek dengan objek lainnya, digunakan variabel semu (*dummy*). Oleh karena itu, model ini sering disebut juga dengan *Least Squares Dummy Variabel* dan disingkat LSDV.¹¹¹ Selain diterapkan untuk efek tiap individu, LSDV ini juga dapat mengakomodasi efek waktu yang bersifat sistematis. Hal ini dapat dilakukan melalui penambahan variabel *dummy* waktu di dalam model.

3.7.1.3. Random Effect Model (REM)

Model data panel pendekatan ketiga yaitu model efek random (*random effect*). Dalam model *fixed effect* memasukkan *dummy* bertujuan mewakili ketidaktahuan tentang model sebenarnya. Namun membawa konsekuensi berkurangnya derajat kebebasan (*degree of freedom*) sehingga pada akhirnya mengurangi efisiensi parameter. Untuk mengatasi kelemahan metode efek tetap yang menggunakan variabel semu, sehingga model mengalami ketidakpastian, dapat digunakan variabel gangguan (*error term*) yang dikenal *random effect*. Tanpa menggunakan variabel semu, metode efek random menggunakan residual, yang diduga memiliki hubungan antar waktu dan objek. Namun untuk menganalisis dengan metode efek random ini ada satu syarat, yaitu objek data silang harus lebih besar daripada banyaknya koefisien.¹¹²

¹¹¹ *Ibid*, hlm 9.15

¹¹² *Ibid*, hlm 9.17

3.7.2. Pemilihan Model Data Panel

Dalam estimasi data panel terdapat tiga teknik yaitu model *common effect*, model *fixed effect* dan model *random effect*. Pemilihan model *fixed effect* dan *random effect*, dari ketiga model yang telah diestimasi akan dipilih model mana yang paling tepat/sesuai dengan tujuan penelitian. Ada tahapan uji yang dapat dijadikan alat dalam memilih model regresi data panel (CE, FE atau RE) berdasarkan karakteristik data yang dimiliki, yaitu:

3.7.2.1.F Test (*Chow Test*)

Uji *Chow-Test* bertujuan untuk menguji atau membandingkan atau memilih model mana yang terbaik apakah model *common effect* atau *fixed effect* yang akan digunakan untuk melakukan regresi data panel. Langkah-langkah yang dilakukan dalam uji *chow-test*, sebagai berikut:

- 1) Estimasi dengan *fixed effect*
- 2) Uji dengan menggunakan *chow-test*
- 3) Melihat nilai *probability F* dan *chi-square* dengan asumsi:
 - a) Bila nilai *probability F* dan *chi-square* $> \alpha = 5\%$, maka uji regresi data panel data menggunakan model *common effect*.
 - b) Bilai nilai *probability F* dan *chi-square* $< \alpha = 5\%$, maka uji regrei data panel menggunakan model *fixed effect*

Untuk pengujian F-Test ini dapat dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : *Common Effect* (CE)

H_1 : *Fixed Effect Model*

Uji F dilakukan dengan memperhatikan nilai probabilitas untuk *Cross-section* F. Jika nilainya $> 0,05$ (ditentukan di awal sebagai tingkat signifikan atau alpha) maka model yang terpilih adalah *common effect* (CE), tetapi jika $< 0,05$ maka model yang terpilih adalah *fixed effect* (FE).

Bila berdasarkan Uji *Chow-Test* model yang terpilih adalah *Common Effect*, maka langsung dilakukan uji regresi data panel. Tetapi bila yang terpilih adalah model *Fixed Effect*, maka dilakukan Uji *Hausman-Test* untuk menentukan antara model *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang akan dilakukan untuk melakukan uji regresi data panel.

3.7.2.2. Uji Hausman Test

Uji *Hausman Test* dilakukan untuk membandingkan atau memilih model mana yang terbaik antara *fixed effect* (FE) dan *random effect* (RE) yang akan digunakan untuk melakukan regresi data panel. Langkah-langkah yang dilakukan dalam *hausman-test*, sebagai berikut:

- 1) Estimasi dengan *Random Effect*
- 2) Uji dengan menggunakan *Hausman-Test*
- 3) Melihat nilai *probability* F dan *chi-square* dengan asumsi:

- a) Bila nilai *probability F* dan *chi-square* $> \alpha = 5\%$, maka uji regresi data panel menggunakan model *random effect*.
- b) Bila nilai *probability F* dan *chi-square* $< \alpha = 5\%$, maka uji regresi data panel menggunakan model *fixed effect*

Dengan pengujian hipotesis sebagai berikut:

H_0 : *Random Effect Model*

H_1 : *Fixed Effect Model*

H_0 ditolak jika P-value lebih kecil dari nilai α .

H_0 diterima jika P-value lebih besar dari nilai α .

Nilai α yang digunakan adalah 5%.

Uji *Hausman* dilihat menggunakan nilai probabilitas dari *cross section random effect* model. Jika nilai probabilitas dalam uji *hausman* lebih kecil dari 5% maka H_0 ditolak yang berarti bahwa model yang cocok digunakan dalam persamaan analisis regresi tersebut adalah model *fixed effect*. Dan sebaliknya jika nilai probabilitas dalam uji *hausman* lebih besar dari 5% maka H_0 diterima yang berarti bahwa model yang cocok digunakan dalam persamaan analisis regresi tersebut adalah model *random effect*.

3.7.3. Uji Asumsi Klasik

Regresi data panel tidak sama dengan model regresi linier, oleh karena itu pada model data panel perlu memenuhi syarat BLUE (*Best Linear Unbiased*

Estimator) atau terbebas dari pelanggaran asumsi-asumsi dasar (asumsi klasik).

Pengujian asumsi klasik dijelaskan sebagai berikut:

3.7.3.1. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas adalah kondisi adanya hubungan linier antar variabel independen. Karena melibatkan beberapa variabel independen, maka multikolinieritas tidak akan terjadi pada persamaan regresi sederhana.¹¹³ dengan bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas.

Dalam uji multikolinieritas dilakukan dengan melihat penggunaan korelasi bivariat dapat dilakukan yaitu untuk melakukan deteksi terhadap multikolinieritas antar variabel bebas dengan standar toleransi 0,8. Jika menunjukkan nilai lebih kecil dari 0,8 maka dianggap variabel tersebut tidak memiliki masalah kolinieritas yang tidak berarti.

3.7.3.2. Uji Normalitas

Salah satu asumsi dalam statistik adalah data berdistribusi normal. Dalam analisis multivariat, para peneliti menggunakan pedoman kalau tiap variabel terdiri 30 data, maka data sudah berdistribusi normal. Apabila analisis melibatkan 3 variabel maka diperlukan data sebanyak $3 \times 30 = 90$. Meskipun demikian, untuk menguji dengan lebih akurat, diperlukan alat analisis dan Eviews menggunakan dua cara, yaitu dengan histogram dan uji Jarque-Bera. Uji Jarque-Bera adalah uji

¹¹³ Wing Wahyu Wiranto, *Analisis Ekonometrika dan Statistik dengan Eviews*. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), hlm 5.1

statistik untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal. Uji mengukur perbedaan *skewness* dan *kurtosis* data dan dibandingkan dengan apabila datanya bersifat normal.. uji normalitas dapat dilakukan pada beberapa variabel sekaligus (namun tanpa histogram) atau satu persatu (bisa dengan histogram). Mendeteksi apakah residualnya berdistribusi normal atau tidak dengan membandingkan nilai Jarque Bera (JB) dengan X^2 tabel, yaitu:

- 1) Jika nilai $JB > X^2$ tabel, maka residualnya berdistribusi tidak normal
- 2) Jika nilai $JB < X^2$ tabel, maka residualnya berdistribusi normal
- 3) Dengan H_0 pada data berdistribusi normal, uji Jarque-Bera

didistribusikan dengan X^2 dengan derajat bebas (*degree of freedom*) sebesar 2. *Probability* menunjukkan kemungkinan nilai Jarque-Bera melebihi (dalam nilai absolut) nilai terobsesi di bawah hipotesis nol. Nilai probabilitas yang kecil cenderung mengarahkan pada penolakan hipotesis nol distribusi normal.¹¹⁴

3.7.3.3. Uji Heteroskedastitas

Uji Heteroskedastitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidak penyimpangan asumsi klasik heteroskedastitas, yaitu adanya ketidak varian dari residual untuk semua pengamatan pada semua model regresi. Persyaratan yang harus terpenuhi dalam model regresi ialah tidak adanya gejala heteroskedastitas.¹¹⁵

¹¹⁴ Wing Wahyu Wiranto, *Analisis Ekonometrika dan Statistik dengan Eviews*. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), hlm 5.41

¹¹⁵ Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate Program* (Semarang: BP UNDIP, 2009), hlm 105

Heteroskedastitas terjadi pada saat residual dan nilai prediksi memiliki korelasi atau pola hubungan. Pola hubungan ini tidak hanya sebatas hubungan yang linier, tetapi dalam pola yang berbeda juga dimungkinkan. Beberapa metode uji heteroskedastitas yang dapat digunakan yaitu, metode grafik, uji park, uji glejser, uji korelasi spearman, uji goldfeld-quandt, uji bruesch-pagan-godfrey, dan uji white.¹¹⁶

Asumsi dalam model regresi adalah :

- 1) Residual e_i memiliki nilai rata-rata nol,
- 2) Residual memiliki varian yang konstan atau $\text{var } e_i = \sigma^2$, dan
- 3) Residual sesuatu observasi tidak saling berhubungan dengan residual observasi lainnya atau $\text{cov } e_i, e_j = 0$, sehingga menghasilkan estimator yang BLUE

Apabila asumsi (1) tidak terpenuhi, yang terpengaruh hanyalah *slope* estimator dan ini tidak membawa konsekuensi serius dalam analisis ekonometris. Sedangkan apabila asumsi (2) dan (3) dilanggar, maka akan membawa dampak serius bagi prediksi dengan model yang dibangun.¹¹⁷

Dasar analisis heteroskedastitas yaitu:

- 1) Jika ada pola tertentu, seperti titik yang membentuk pola yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastitas.

¹¹⁶ Wing Wahyu Wiranto, *Analisis Ekonometrika dan Statistik dengan Eviews*. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), hlm 5.8

¹¹⁷ *Ibid*, hlm 5.8

- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastitas.

3.7.4. Uji Hipotesis

3.7.4.1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi menjelaskan variasi pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Atau dapat pula dikatakan sebagai proporsi pengaruh seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R^2 yang mendekati 1 menunjukkan bahwa variabel dalam model tersebut dapat mewakili permasalahan yang diteliti, karena dapat menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependennya (terikat). Nilai R^2 sama dengan atau mendekati 0 menunjukkan variabel dalam model yang dibentuk tidak dapat menjelaskan variasi dalam variabel terikat. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*cross section*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar anantara masing-masing pengamatan.¹¹⁸

3.7.4.2. Uji t-Statistik (Uji Parsial)

Uji t-Statistik digunakan untuk menguji pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel tak bebas secara parsial. Menentukan daerah penerimaan dengan menggunakan uji t. Titik kritis yang dicari dari tabel distribusi t dengan tingkat kesalahan atau level signifikan 0,05. Dengan kreteria pengujian yang digunakan, yaitu:

¹¹⁸ Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate Program* (Semarang: BP UNDIP, 2009), hlm 125

- 1) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, yang artinya salah satu variabel *independen* (bebas) tidak mempengaruhi variabel *dependen* (terikat) secara signifikan
- 2) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang artinya salah satu variabel *independen* (bebas) mempengaruhi variabel terikat secara signifikan.

3.7.4.3. Uji F-Statistik (Uji Simultan)

Uji F-Statistik yaitu untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel tak bebas secara keseluruhan (*simultan*). Uji F-Statistik biasanya berupa:

H_0 : variabel bebas tidak mempengaruhi variabel terikat

H_a : variabel bebas mempengaruhi variabel terikat

Dasar pengambilan keputusan ialah H_0 akan ditolak jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, artinya variabel bebas (X) secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y). H_a akan diterima jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, artinya variabel bebas (X) secara simultan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y).¹¹⁹

¹¹⁹ Muhammad Firdaus, *Ekonometrika Suatu Pendekatan Aplikatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm 148

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, maka berikut hasil analisis statistik deskriptif dari variabel-variabel dalam penelitian ini, dari Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan dan PDRB perkapita serta Indeks Pembangunan Manusia adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif

Date: 11/14/18
Time: 08:35
Sample: 2010 2016

	Y	X1	X2	X3	X4
Mean	65.52924	1093.857	2620.762	2502.086	1594.352
Median	64.27000	1098.000	2643.000	2524.000	1592.000
Maximum	76.59000	1229.000	2801.000	2663.000	1828.000
Minimum	58.88000	937.0000	1834.000	1728.000	1260.000
Std. Dev.	4.244140	73.21155	141.6487	144.9903	106.3461
Skewness	1.066460	-0.324660	-3.373740	-3.435599	0.149426
Kurtosis	3.188793	2.498903	16.98378	16.44367	3.056987
Jarque-Bera	20.05932	2.943126	1054.701	997.2625	0.404951
Probability	0.000044	0.229566	0.000000	0.000000	0.816706
Sum	6880.570	114855.0	275180.0	262719.0	167407.0
Sum Sq. Dev.	1873.323	557432.9	2086693.	2186306.	1176188.
Observations	105	105	105	105	105

Sumber : diolah Eviews 10

1. Indeks Pembangunan Manusia

Data statistik deskriptif dari nilai variabel terikat yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat dilihat dari Tabel 4.1. Dari hasil uji statistik output Eviews 10 yang tertera pada Tabel 4.1 diatas menunjukkan jumlah observasi sebanyak

105, yang diperoleh dari perkalian *time series* sebanyak 7 tahun dari 2010-2016 dan jumlah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 15 Kabupaten/Kota. Hasil uji menunjukkan angka bilai rata-rat (*mean*) adalah 65.52924, nilai tengah-tengah (*median*) adalah 64.27000, nilai tertinggi (*maximum*) adalah 76.59000, dan nilai terendah (*minimum*) adalah 58.88000. Hasil dari nilai *maximum* adalah 76.59000 dapat dikatakan bahwa Indeks Pembangunan Sumatera Selatan dari tahun 2010-2016 mencapai klasifikasi tinggi.

2. Tingkat Kemiskinan

Data statistik deskriptif dari nilai variabel terikat yaitu Tingkat Kemiskinan dapat dilihat dari Tabel 4.1. Dari hasil uji statistik output Eviews 10 yang tertera pada Tabel 4.1 diatas menunjukkan jumlah observasi sebanyak 105, yang diperoleh dari perkalian *time series* sebanyak 7 tahun dari 2010-2016 dan jumlah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 15 Kabupaten/Kota. Hasil uji menunjukkan angka bilai rata-rat (*mean*) adalah 1093.857, nilai tengah-tengah (*median*) adalah 1098.000, nilai tertinggi (*maximum*) adalah 1229.000, dan nilai terendah (*minimum*) adalah 937.0000.

3. Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan

Data statistik deskriptif dari nilai variabel terikat yaitu Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dapat dilihat dari Tabel 4.1. Dari hasil uji statistik output Eviews 10 yang tertera pada Tabel 4.1 diatas menunjukkan jumlah observasi sebanyak 105, yang diperoleh dari perkalian *time series* sebanyak 7 tahun dari 2010-2016 dan jumlah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 15 Kabupaten/Kota. Hasil uji menunjukkan angka bilai rata-rat

(*mean*) adalah 2620.762, nilai tengah-tengah (*median*) adalah 2643.000, nilai tertinggi (*maximum*) adalah 2801.000, dan nilai terendah (*minimum*) adalah 1834.000.

4. Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan

Data statistik deskriptif dari nilai variabel terikat yaitu Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan dapat dilihat dari Tabel 4.1. Dari hasil uji statistik output Eviews 10 yang tertera pada Tabel 4.1 di atas menunjukkan jumlah observasi sebanyak 105, yang diperoleh dari perkalian *time series* sebanyak 7 tahun dari 2010-2016 dan jumlah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 15 Kabupaten/Kota. Hasil uji menunjukkan angka bilai rata-rat (*mean*) adalah 2502.086, nilai tengah-tengah (*median*) adalah 2524.000, nilai tertinggi (*maximum*) adalah 2663.000, dan nilai terendah (*minimum*) adalah 1728.000.

5. Pendapatan Perkapita

Data statistik deskriptif dari nilai variabel terikat yaitu Pendapatan Perkapita dapat dilihat dari Tabel 4.1. Dari hasil uji statistik output Eviews 10 yang tertera pada Tabel 4.1 di atas menunjukkan jumlah observasi sebanyak 105, yang diperoleh dari perkalian *time series* sebanyak 7 tahun dari 2010-2016 dan jumlah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 15 Kabupaten/Kota. Hasil uji menunjukkan angka bilai rata-rat (*mean*) adalah 1594.352, nilai tengah-tengah (*median*) adalah 1592.000, nilai tertinggi (*maximum*) adalah 1828.000, dan nilai terendah (*minimum*) adalah 1260.000.

4.2. Uji Statistik

4.2.1. Estimasi Regresi dengan Data Panel

1. Pendekatan *Pooled Least Square* (PLS)

Pendekatan yang disebut juga dengan *Metode Common Effect*, merupakan pendekatan paling sederhana dengan mengasumsikan bahwa data gabungan yang ada menunjukkan keadaan yang sesungguhnya, hasil analisis regresi dianggap berlaku pada semua objek pada semua waktu. Setelah melakukan pengolahan data dengan menggunakan *Pooled Last Square*, dari hasil pengolahan *E-views* 10.0 didapatkan hasil tampilan sebagai berikut:

Tabel 4.2
Regresi *Pooled Least Square*

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 10/22/18 Time: 19:43
Sample: 2010 2016
Periods included: 7
Cross-sections included: 15
Total panel (balanced) observations: 105

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	-0.039138	0.012794	-3.059072	0.0028
X2	0.000340	0.005679	0.059907	0.9523
X3	0.008173	0.005209	1.569172	0.1198
X4	0.028336	0.008545	3.316255	0.0013
C	41.82098	8.207036	5.095747	0.0000
R-squared	0.173528	Mean dependent var		65.52924
Adjusted R-squared	0.140469	S.D. dependent var		4.244140
S.E. of regression	3.934781	Akaike info criterion		5.624035
Sum squared resid	1548.250	Schwarz criterion		5.750414
Log likelihood	-290.2619	Hannan-Quinn criter.		5.675247
F-statistic	5.249048	Durbin-Watson stat		0.171313
Prob(F-statistic)	0.000703			

Sumber: diolah Eviews 10

2. Pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM)

Model *fixed effect* ialah bahwa satu objek, memiliki konstanta yang tetap besarnya untuk berbagai periode waktu. Untuk membedakan satu objek dengan objek lainnya, digunakan variabel semu (*dummy*). Setelah melakukan pengolahan data dengan menggunakan *fixed effect model* dari pengolahan *E-views* 10.0 didapatkan hasil tampilan sebagai berikut:

Tabel 4.3
Regresi *Fixed Effect Model*

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 10/19/18 Time: 13:12
Sample: 2010 2016
Periods included: 7
Cross-sections included: 15
Total panel (balanced) observations: 105

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	44.58450	18.29700	2.436710	0.0169
X1	-0.009135	0.014717	-0.620708	0.5364
X2	-0.001558	0.001902	-0.818913	0.4151
X3	0.006178	0.001823	3.389229	0.0011
X4	0.012269	0.004981	2.463156	0.0158

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.926648	Mean dependent var	65.52924
Adjusted R-squared	0.911296	S.D. dependent var	4.244140
S.E. of regression	1.264043	Akaike info criterion	3.468800
Sum squared resid	137.4113	Schwarz criterion	3.949040
Log likelihood	-163.1120	Hannan-Quinn criter.	3.663403
F-statistic	60.35751	Durbin-Watson stat	0.630737
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: diolah Eviews 10

3. Pendekatan *Random Effect Model*

Pendekatan *random effect model* yaitu untuk mengatasi kelemahan metode efek tetap yang menggunakan variabel semu, sehingga model mengalami ketidak

pastian. Tanpa menggunakan variabel semu, metode efek random menggunakan residual yang diduga memiliki hubungan antar waktu dan objek. Setelah melakukan pengolahan menggunakan *Random Effect Model* dari pengolahan *E-views* 10.0 didapatkan hasil tampilan sebagai berikut:

Tabel 4.4
Regresi *Random Effect Model*

Dependent Variable: Y
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 10/19/18 Time: 13:14
 Sample: 2010 2016
 Periods included: 7
 Cross-sections included: 15
 Total panel (balanced) observations: 105
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	48.00161	12.35508	3.885174	0.0002
X1	-0.012527	0.010770	-1.163165	0.2475
X2	-0.001544	0.001900	-0.812261	0.4186
X3	0.006240	0.001816	3.436776	0.0009
X4	0.012333	0.004613	2.673442	0.0088

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		4.142220	0.9148
Idiosyncratic random		1.264043	0.0852

Weighted Statistics			
R-squared	0.272590	Mean dependent var	7.508361
Adjusted R-squared	0.243494	S.D. dependent var	1.441345
S.E. of regression	1.253643	Sum squared resid	157.1622
F-statistic	9.368535	Durbin-Watson stat	0.561162
Prob(F-statistic)	0.000002		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.127233	Mean dependent var	65.52924
Sum squared resid	1634.975	Durbin-Watson stat	0.053942

Sumber: diolah Eviews 10

4.2.2. Memilih Metode Data Panel

1. Uji Chow

Uji *Chow-Test* bertujuan untuk menguji atau membandingkan atau memilih model mana yang terbaik antara model *common effect* atau *fixed effect* yang akan digunakan untuk melakukan regresi data panel. Dilakukan uji Chow. Hasil regresi berdasarkan metode *fixed effect model* menggunakan *E-views 10.0* didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.5
Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	63.070375	(14,86)	0.0000
Cross-section Chi-square	254.299719	14	0.0000

Sumber: diolah Eviews10

Uji F dilakukan dengan memperhatikan nilai probabilitasnya untuk *Cross-section F*. Jika nilainya $> 0,05$ (ditentukan di awal sebagai tingkat signifikan atau alpha) maka model yang terpilih ialah *common effect* (CE), tetapi jika $< 0,05$ maka model yang terpilih ialah *fixed effect* (FE).

Dari tabel diatas terlihat bahwa nilai Prob. Cross-section F sebesar $0,0000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa model *fixed effect* lebih tepat jika dibandingkan dengan model *common effect*. Seterusnya akan dibandingkan dengan model *random effect* untuk menentukan model mana yang lebih tepat.

2. Uji Hausmant Test

Uji *Hausmant Test* dilakukan untuk membandingkan atau memilih model mana yang terbaik antara *fixed effect* (FE) atau *random effect* (RE) yang akan digunakan untuk melakukan regresi data panel, berdasarkan metode *random effect* menggunakan *E-views* 10.0 didapatkan hasil tampilan sebagai berikut:

Tabel 4.6
Uji Hausmant

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	2.361283	4	0.6696

Sumber: diolah Eviews 10

Dari tabel uji *hausmant* di atas terlihat bahwa nilai Prob. Cross-section random sebesar 0.6696 yang nilainya $> 0,05$ sehingga dapat disimpulkan model *random effect* (RE) lebih tepat jika dibandingkan dengan *fixed effect* (FE). Jika nilai Prob. $< 0,05$ maka model yang dipilih adalah *fixed effect*.

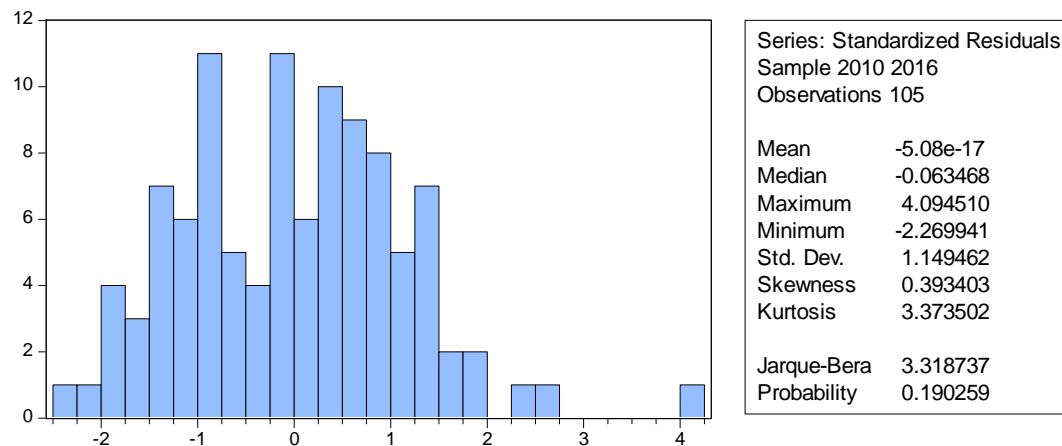
Berdasarkan pemilihan model diatas telah ditetapkan bahwa model yang terbaik digunakan dalama penelitian adalah *Fixed Effect*, karena uji *chow* terlihat bahwa nilai probabilitas $< 5\%$ berarti H_0 ditolah dan H_A diterima. Hal ini dibuktikan juga dengan melihat Prob F-hitung sebesar 0.000000 dan R-squared 0.926648.

4.2.3. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel independent, variabel dependent atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Metode yang digunakan ialah Uji Jarque-Bera. Jika hasil uji $JB > 0,05$ maka hipotesis nol diterima yang berarti berdistribusi normal. Jika hasil uji $JB < 0,05$, maka hipotesis nol ditolak yang artinya tidak berdistribusi normal. Setelah dilakukan pengolahan data dengan menggunakan *E-views 7.0* maka akan diperoleh hasil sebagai berikut:

Gambar 4.1
Uji Normalitas



Dari uji normalitas diatas, nilai Prob JB hitungnya sebesar $0.190259 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa residual pada penelitian ini terdistribusi normal yang artinya asumsi klasik tentang kenormalan telah terpenuhi.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Karena melibatkan beberapa variabel independen, maka multikolinieritas tidak akan terjadi pada persamaan regresi sederhana. Didapatkan hasil uji multikolinieritas sebagai berikut:

Tabel 4.7
Uji Multikolinieritas

	X1	X2	X3	X4
X1	1.000000	0.394965	0.205994	0.705184
X2	0.394965	1.000000	0.647844	0.353077
X3	0.205994	0.647844	1.000000	0.191592
X4	0.705184	0.353077	0.191592	1.000000

Untuk menguji masalah multikolinieritas dapat melihat matriks korelasi dari variabel bebas, jika terjadi koefisien korelasi lebih dari 0,80 maka terdapat multikolinieritas. Dari tabel diatas dapat dilihat nilai koefisien korelasinya antar variabel independen dibawah 0,80 dengan demikian data dalam penelitian ini tidak terjadi masalah multikolinieritas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas, adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Persyaratan yang harus terpenuhi dalam model regresi ialah tidak adanya heteroskedastisitas. Ada beberapa metode pengujian heteroskedastisitas yang bisa digunakan diantaranya yaitu uji park, uji glejser, melihat pola grafik regresi dan uji koefisien korelasi

spearman. Untuk melakukan uji heteroskedastisitas dengan menggunakan *Glejser Heteroskedasticity* yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.8
Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: RESABS
Method: Panel Least Squares
Date: 10/31/18 Time: 21:58
Sample: 2010 2016
Periods included: 7
Cross-sections included: 15
Total panel (balanced) observations: 105

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	-0.004671	0.006926	-0.674470	0.5018
X2	-0.000306	0.000895	-0.342338	0.7329
X3	1.20E-06	0.000858	0.001402	0.9989
X4	-0.011476	0.002344	-4.895608	0.4541
C	25.13683	8.611063	2.919132	0.0045

Sumber: diolah Eviews 7.0

Berdasarkan pada tabel 4.12 variabel X1 Tingkat Kemiskinan (independen) Prob. 0.5018 > 0,05 X2 Pengeluaran Pemerintah (Pendidikan) (independen) Prob. 0.7329 > 0,05 X3 Pengeluaran Pemerintah (Kesehatan) (Independen) Prob. 0.9969 > 0,05 X4 Pendapatan Perkapita (independen) Prob. 0.4541 > 0,05 dari keempat variabel diatas nilai Probability nya diatas 0,05 jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadinya heteroskedastisitas.

4.2.4. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisi yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel independen (Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan dan Pendapatan Perkapita) terhadap variabel dependen (Indeks Pembangunan Manusia). Hasil dari penggunaan analisis regresi berganda ini dapat digunakan untuk memutuskan nilai variabel independen mengalami

kenaikan atau penurunan dan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif. Berikut hasil pengolahan data uji regresi linier berganda, bentuk regresi liniernya yaitu:

$$Y = a + b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 x_3 + b_4 x_4$$

Y_i : Indeks Pembangunan Manusia

$b_1 x_1$: tingkat kemiskinan

$b_2 x_2$: pengeluaran pemerintah bidang pendidikan

$b_3 x_3$: pengeluaran pemerintah bidang kesehatan

$b_4 x_4$: Pendapatan Perkapita

a : konstanta

$$IPM = 44.58450 - 0.009135 - 0.001558 + 0.006178 + 0.012269$$

Persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta α adalah 44.58450 artinya jika Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan dan Pendapatan Perkapita bilainya 0, maka IPM nilainya sebesar 44.58450.
- b. Nilai koefisien regresi variabel Tingkat Kemiskinan bernilai negatif sebesar - 0.009135 artinya jika Tingkat Kemiskinan mengalami penurunan sebesar 1%, maka akan menurunkan IPM sebesar 0.009135 dengan asumsi variabel lainnya bernilai tetap.
- c. Nilai koefisien regresi variabel Pengeluaran Pemerintah sektor Pendidikan bernilai negatif sebesar - 0.001558 artinya bahwa setiap penurunan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan sebesar 1%, maka akan menurunkan IPM sebesar 0.001558 dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap

- d. Nilai koefisien variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan bernilai positif 0.006178 artinya bahwa setiap kenaikan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan sebesar 1%, maka akan menaikkan IPM sebesar 0.006178 dengan dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap.
- e. Nilai koefisien variabel Pendapatan Perkapita bernilai positif sebesar 0.012269 artinya bahwa setiap kenaikan Pendapatan Perkaipita sebesar 1%, maka akan menaikkan IPM sebesar 0.012269 dengan dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap.

4.2.5. Uji Hipotesis

1. Uji Determinasi (R^2)

Uji determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi dependen. Hasil dari regresi pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan, dan Pendapatan Perkapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Selatan Tahun 2010-2016. Dapat dilihat pada tabel 4.3 koefisien determinasi ialah sebesar 0.911296. Bila dipersenkan maka akan menjadi 91,12%, yang berarti bahwa 91% Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Selatan dapat dijelaskan oleh variabel Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah di Sektor pendidikan dan Sektor Kesehatan, dan Pendapatan Perkapita. Sedangkan, sisanya yaitu 8 persen dijelaskan oleh vaiarbel lain di luar model atau faktor lain.

2. Uji t-statistik (Uji Parsial)

Uji t-Statistik pada dasarnya adalah untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel bebas secara individu dalam menerangkan variasi variabel

dependen. Apakah variabel bebas (Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan, dan Pendapatan Perkapita) berpengaruh secara parsial terhadap variabel terikat (Indeks Pembangunan Manusia). Pada persamaannya, dengan $df = 100$ taraf signifikan 0,05 maka pada t-tabel sebesar 1.66023. didapatkan hasil uji persamaan sebagai berikut:

Tabel 4.9
Uji t-statistik parsial

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 10/19/18 Time: 13:12
Sample: 2010 2016
Periods included: 7
Cross-sections included: 15
Total panel (balanced) observations: 105

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	44.58450	18.29700	2.436710	0.0169
X1	-0.009135	0.014717	-0.620708	0.5364
X2	-0.001558	0.001902	-0.818913	0.4151
X3	0.006178	0.001823	3.389229	0.0011
X4	0.012269	0.004981	2.463156	0.0158

Sumber: diolah Eviews 10

Berdasarkan dari hasil tabel diatas menunjukkan bahwa hasil regresi pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan, dan Pendapatan Perkapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Selatan diperoleh nilai t-hitung variabel Tingkat Kemiskinan -0.62, variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan -0.81, Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan 3.38, dan variabel Pendapatan Perkapita 2.46 dengan $df = 100$ taraf signifikan 0,05 maka pada t-tabel sebesar 1.66023. dengan memperhatikan hasil dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa menerima H_1 dan menolak H_0 serta menerima H_0 dan menolak H_a .

- a. Variabel Tingkat kemiskinan tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia karena Prob 0.5364 > taraf signifikan 0.05
- b. Variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia karena Prob 0.4151 > taraf signifikan 0.05
- c. Variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor kesehatan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia karena Prob 0.0011 < taraf signifikan 0.05
- d. Variabel Pendapatan Perkapita berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia Karena Prob 0.0158 < taraf signifikan 0.05

3. Uji f-statistik (Uji Simultan)

Uji f-statistik dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas, yaitu Tingkat kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan, dan Pendapatan Perkapita secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, yaitu Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Selatan. Setelah dilakukan pengolahan data dengan menggunakan Eviews 7.0 dan 10 mengenai uji f, didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.10
Uji F-statistik (Simultan)

F-statistic	60.35751
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: diolah Eviews 10

Berdasarkan dari persamaan diatas menunjukkan bahwa hasil uji f pada penelitian ini memiliki nilai F-statistik sebesar 60.35751 jauh lebih besar dari f tabel 2.46 dengan Prob f-statistik 0.000000 < 0,05. Berarti bahwa variabel bebas yaitu Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan

Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, dan Pendapatan Perkapita secara bersama-sama dan signifikan mempengaruhi variabel Indeks Pembangunan Manusia yang ada di 15 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.

4.2.5. Pembahasan

1. Tingkat Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Hasil pengujian regresi diperoleh bahwa koefisien dari tingkat kemiskinan sebesar -0.009135 dengan t-statistik $-0.620708 < t\text{-tabel } 1.66023$, dan angka signifikannya sebesar 0.5364 yang berarti bahwa tingkat kemiskinan tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Selatan. Angka signifikan $0.5364 > 0,05$ yang menunjukkan tidak adanya taraf signifikan sebuah hubungan. Artinya kenaikan Tingkat Kemiskinan tidak berpengaruh terhadap besarnya tingkat Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Selatan.

Kemiskinan adalah terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Oleh karena itu, tingkat kemiskinan dapat mempengaruhi nilai IPM.

Tidak berpengaruhnya tingkat kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Selatan menunjukkan bahwa terjadi pengaruh daya beli masyarakat miskin di 15 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok

cukup tinggi¹²⁰. Daya beli masyarakat merupakan salah satu indikator komposit Indeks Pembangunan Manusia. Strategi pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat yaitu, pemerintah perlu menjamin stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat dan menjaga ketersediaannya harga kebutuhan pokok yang tidak terkendali bisa menimbulkan inflasi yang tinggi dan dapat menimbulkan ketidakstabilan politik. Ketidakberhubungannya pengaruh tingkat kemiskinan terhadap Indeks pembangunan Manusia juga menunjukkan bahwa masalah kemampuan seseorang atau kelompok orang dalam masyarakat untuk mencapai atau mendapatkan kebutuhan dasarnya yang seharusnya menjadi haknya sebagai manusia dan sebagai warga negara telah terpenuhi.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Nursiah Chalid dan Yusbar Yusuf dalam jurnalnya (2014). Menemukan bahwa pengaruh Tingkat Kemiskinan tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh.

2. Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Hasil pengujian regresi diperoleh bahwa koefisien dari Pengeluaran Pemerintah sektor Pendidikan -0.001558 dengan t-statistik $-0.818913 < t\text{-tabel } 1.66023$. Angka signifikan sebesar $0.4151 > 0,05$ yang menunjukkan tidak adanya taraf signifikan sebuah hubungan. Artinya tidak adanya pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap nilai Indeks Pembangunan Manusia.

Pemerintah menempatkan pendidikan sebagai faktor penting dalam menunjang pembangunan nasional. Hal tersebut terlihat dari besarnya

¹²⁰ Admin, "IPM Sumsel Diperkirakan Naik". www.radar-palembang.com/ipm-sumsel-diperkirakan-naik/. (diakses, 6 Desember 2018)

pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan. Pemerintah menyediakan anggaran minimal 20% dari APBN untuk bidang pendidikan. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada 49 mengamanatkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidikan dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pendidikan adalah hal mendasar dalam meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan menjamin sosial dan ekonomi. Bangsa-bangsa miskin telah menginvestasikan dana yang besar untuk investasi di bidang pendidikan karena tenaga ahli yang dapat membaca dan menulis dianggap lebih dapat memahami produk dan material terus berkembang. Dalam membangun pendidikan melalui sistem yang dibentuk, maka belanja pemerintah terhadap pendidikan menjadi salah satu indikator yang dapat mengukur IPM berdasarkan komponen pendidikan yang mampu menjelaskan antara hubungan keduanya.

Hasil regresi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Selatan. Belum signifikannya pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan terhadap IPM di Sumatera Selatan diakibatkan oleh belum optimalnya pelaksanaan program-program pendidikan dimana pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan tidak berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan. Seperti, contohnya tenaga pengajar yang terdidik dan pelatihan bagi guru dan siswa. Namun masi pada pembangunan sekolah secara

fisik. Selain itu jumlah rata-rata sekolah masih tergolong rendah serta pembangunan vasilitas sekolah sarana dan prasarana yang belum berjalan optimal.

Selain itu, ada beberapa daerah seperti daerah Kabupaten yang terletak di perairan Banyuasin, transportasi yang kurang memadai menjadi masalah utama dalam pendidikan di daerah tersebut, sehingga sulit untuk memperoleh akses menuju ke sarana pendidikan atau sekolah. Mengingat daerah tersebut mempunyai eilayah sungai yang cukup luas, dalam masalah ini pemerintah terkait masih berfokus kepada pembangunan sarana pendidikan secara umum saja. Faktor-faktor eksternal selain pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan ternyata ikut menentukan pelaksanaan yang diharapkan seperti kemudahan akses memperoleh pendidikan itu sendiri.

Belum signifikannya pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan disebabkan oleh anggaran pendidikan yang belum mencapai 20%, sebagaimana yang seharusnya di alokasikan berdasarkan Undang-Undang dasar 1945, Pasal 31, Ayat 2, 3, dan 4 mengenai kewajiban pemerintah terkait pengalokasian dana pendidikan.

Hubungan tidak berpengaruh antar variabel Pengeluaran Pemerintah sektor Pendidikan terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia tidak sesuai dengan hipotesisi dan dengan teori. Menurut teori Rostow dan Musgrave dalam buku Lanjouw, dkk yaitu pandang yang timbul dari pengamatan atas pengalaman pembangunan ekonomi yang dialami banyak negara tetapi tidak didasari oleh suatu teori tertentu. Selain tidak jelas apakah tahap pertumbuhan ekonomi terjadi dalam tahap demi tahap atau beberapa tahap dapat terjadi secara simultan.

Pendidikan dan kesehatan yang baik akan meningkatkan kapasitas dan kemerdekaan hidup yang dinamakan manfaat intrinsik. Pendidikan dan kesehatan berperan membuka peluang yang lebih besar untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi yang dinamakan manfaat instrumental. Pendidikan dan kesehatan penduduk sangat menentukan kemampuan untuk menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baik dalam kaitannya dengan teknologi sampai kelembagaan yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan pendidikan yang baik, pemanfaatan teknologi ataupun inovasi teknologi menjadi mungkin untuk terjadi. Seperti diungkapkan oleh Mier dan Rauch dikatakan pendidikan, atau lebih luas lagi adalah modal manusia, dapat memberikan kontribusi pembangunan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khoirul Fikri T (2016). Dimana diperoleh hasil penelitian bahwa Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

3. Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil pengujian regresi diperoleh koefisien dari pengeluaran pemerintah sektor kesehatan 0.006178 dengan t-statistik 3.389229 > t-tabel 1.66023. dengan angka signifikannya 0.0011 yang berarti bahwa pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Selatan. Angka signifikannya sebesar 0.0011 < 0,05 yang menunjukkan adanya taraf signifikan sebuah hubungan. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan juga mempunyai pengaruh positif dan signifikan

terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Artinya semakin besar pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan akan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang tercermin oleh Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini menjelaskan bahwa jika pengeluaran pemerintah sektro kesehatan mengalami kenaikan.

Pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan, Undang-Undang di Indonesi yang mengatur mengenai anggaran kesehatan adalah UU No 36 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa besar anggaran ksehatan pemerintah pusat dialokasikan minimal 5% dari APBN di luar gaji, sementara besar anggaran kesehatan pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10% dari APBD di luar gaji.

Dari hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Selatan. Secara umum, pencapaian indikator program kesehatan pada tahun 2016 sudah dapat mencapai target yang ditetapkan serta terlihat adanya peningkatan pencapaian indikator program kesehatan dari tahun ke tahun. Pemerintah Sumatera Selatan telah melaksanakan berbagai program pembangunan kesehatan secara sistematis dan berkesinambungan. Pencapaian ini juga terjadi karena pemerintah telah mencoba mengembangkan dan mengimplementasikan beberapa program maupun kegiatan kesehatan yang berpihak untuk rakyat banyak, salah satunya yaitu jaminan kesehatan masyarakat. Program ini sdiamatkan oleh Undang-Undang No 40 tahun 2004 tentnag sistem jaminan sosial nasional. Pemerintah Sumatera Selatan telah mengesahkan melalu peraturan Gubernur Sumatera Selatan No 23 Tahun

2009. Sehingga hal ini mempengaruhi dalam peningkatan kualitas pembangunan manusia itu sendiri.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ajeng Pradesti Amanda Putri (2015). Dimana diperoleh hasil penelitian bahwa Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

4. Pendapatan Perkapita (PDRB) terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil pengujian regresi diperoleh bahwa koefisien dari PDRB 0.012269 dengan t-statistik 2.463156 > t-tabel 1.66023. dengan angka signifikannya 0.0158 yang berarti bahwa Pendapatan Perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Selatan. Angka signifikan 0.0158 < 0,05 yang menunjukkan adanya taraf signifikan sebuah hubungan. Artinya bahwa peningkatan PDRB perkapita sebesar 1 persen menyebabkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Selatan 2.463. Sehingga variabel PDRB perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Artinya ketika perekonomian terus tumbuh yang dicerminkan oleh PDRB perkapita yang meningkat akan mengakibatkan nilai Indeks Pembangunan Manusia meningkat.

Norton (2002) menyatakan bahwa apabila pertumbuhan PDRB perkapita tinggi berarti terdapat lebih banyak pekerjaan yang lebih baik dan tingkat pendapatan yang lebih tinggi, secara ekonomi makro, PDRB perkapita dapat mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia. PDRB perkapita akan meningkatkan standar hidup layak masyarakat sehingga daya beli juga mengalami

peningkatan. Peningkatan daya beli berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.

Peningkatan PDRB perkapita akan langsung disarankan masyarakat manfaatnya untuk meningkatkan kualitas hidupnya, saat dirasa ingin meningkatkan pengetahuannya, dapat langsung membeli buku diperlukan, saat sedang sakit bisa langsung berobat ke dokter ataupun rumah sakit. peningkatan PDRB perkapita, seseorang dapat meningkatkan daya belinya (konsumen) guna peningkatan kualitas hidupnya. Tingginya pertumbuhan PDRB perkapita akan menyebabkan pola konsumsi di masyarakat akan meningkat dan dalam hal ini meningkatkan tingkat daya beli. Tingginya tingkat daya beli di masyarakat akan berpengaruh terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, karena daya beli di masyarakat merupakan satu indikator komposit dalam pembentukan IPM yang dilihat dari segi pendapatan. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

PDRB tahun 2016 secara nominal mencapai Rp 355 Triliun, dari harga konstan yakni Rp 266 Triliun. Secara umum PDRB tumbuh 5.03 % selama tahun 2016, lebih cepat dari nasional yang hanya 5,02%. Sumbangan terbesar terhadap pertumbuhan tersebut ialah dari lapangan usaha industri pengolahan dan lapangan usaha konstruksi perdagangan besar, eceran dan reparasi serta beberapa sektor lainnya. Kemudian juga diikuti dari sektor lapangan perusahaan listrik dan pengadaan air, serta sektor perdagangan juga tumbuh pesat menurut BPS Sumatera Selatan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Neng Sinta Lela Sari (2017). Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB perkapita berpengaruh positif dan signifikan.

5. Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan, dan Pendapatan Perkapita (PDRB perkapita) secara bersama-sama terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Variabel Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan, dan Pendapatan Perkapita secara bersama-sama berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Selatan. Hal ini berarti Indeks Pembangunan Manusia dipengaruhi oleh empat faktor atau empat variabel tersebut. Hasil dari pengujian regresi diperoleh koefisien dari Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan, Pendapatan Perkapita secara simultan atau bersama-sama sebesar F-statistik 60.35751 lebih besar dari F tabel 2.46 dengan Prob. F-statistik $0.000000 < 0,05$ yang berarti bahwa variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Tingkat Kemiskinan bisa mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia dengan meningkatnya kemiskinan dapat menurunkan nilai Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Selatan, karena dengan rendahnya pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan dapat menurunkan kualitas dari sumber daya manusia yang tersedia.

Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan adalah faktor terpenting dalam pembangunan manusia karena faktor utama dalam

peningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan diharapkan mampu meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia yang tersedia. Mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, tenaga kerja yang berpendidikan, berwawasa luas, memiliki keterampilan dan sehat secara jasmani dan rohani sehingga mampu meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Manusia.

PDRB perkapita dalam teori yang dikemukakan oleh Kuznet dalam Todaro yang menyatakan bahwa salah satu karakteristik pertumbuhan ekonomi modern adalah tingginya output perkapita. Dalam hal ini pertumbuhan output yang dimaksudkan adalah PDRB perkapita. Tingginya pertumbuhan output akan menyebabkan pola konsumsi di masyarakat akan meningkatkan dan dalam hal ini akan meningkatkan tingkat daya beli. Tingginya tingkat daya beli di masyarakat akan berpengaruh terhadap peningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, karena daya beli masyarakat merupakan salah satu indikator komposit dalam pembentukan IPM yang dilihat dari segi pendapatan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai analisis tingkat kemiskinan, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan sektor kesehatan, dan pendapatan perkapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Selatan tahun 2010-2016, dapat disimpulkan bahwa:

1. Tingkat kemiskinan secara parsial tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Selatan tahun 2010-2016, hal ini berarti bahwa kenaikan Tingkat Kemiskinan tidak mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia yang ada di Sumatera Selatan. Tingkat Kemiskinan tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia disebabkan oleh tidak adanya efek langsung masalah pencapaian pembangunan manusia melalui pengetasan program-program kemiskinan.
2. Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan tidak berpengaruh terhadap Indeks pembangunan Manusia. Hal ini menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan tidak mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis dan teori dari penelitian ini, pendidikan sangat menentukan kemampuan menyerap dan mengelola sumber pertumbuhan ekonomi, dengan pendidikan yang baik, dapat memberikan kontribusi pembangunan manusia yang berkualitas. Meskipun hasil regresi tidak berpengaruh antara pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan terhadap IPM. Efek

pendidikan ini akan didapat dalam jangka waktu yang lama dan tidak serta merta didapat langsung manfaatnya.

3. Pengeluaran Pemerintah sektor kesehatan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini menjelaskan bahwa jika pengeluaran pemerintah sektor kesehatan mengalami kenaikan, maka Indeks Pembangunan Manusia akan naik pula. Hal ini berarti bahwa semakin besar pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang tercerminkan oleh IPM yang meningkat.
4. Pendapatan Perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Selatan tahun 2010-2016. PDRB perkapita dapat melihat kondisi perekonomian suatu wilayah. Kondisi perekonomian yang tumbuh dari waktu ke waktu akan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Artinya ketika perekonomian terus tumbuh yang dicerminkan oleh PDRB perkapita yang meningkat akan mengakibatkan nilai IPM meningkat.

5.2. Saran

Setelah melakukan analisis dalam penelitian ini, maka diperoleh beberapa saran, yaitu:

1. Pemerintah perlu mengoptimalkan proporsi pengeluaran pemerintah untuk investasi terutama untuk sektor pendidikan dengan mengalokasikan pengeluaran untuk program-program pendidikan maupun kesehatan untuk semua golongan masyarakat. Sehingga kebutuhan dasar manusia dalam hal ini pendidikan dan kesehatan bisa terpenuhi pada semua golongan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat pula. Dan pemanfaatan dan pengalokasian anggaran ini digunakan dengan baik dan lebih tepat, sehingga peningkatan nilai IPM itu sendiri dapat terpenuhi.
2. Pendapatan perkapita atau PDRB perkapita berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Selatan sehingga pemerintah daerah dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia diharapkan meningkatkan jumlah PDRB disertai dengan kebijakan lain yang dapat mendorong peningkatan jumlah penduduk sebab peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun akan membuat peningkatan PDRB perkapita menjadi lambat.
3. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel-variabel lain serta pengeluaran pemerintah di sektor lain yang dapat menjelaskan pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- A. Samuelson, Paul, William D. Nordhaus. (1992). *Mikro Ekonomi*. Jakarta : Erlangga
- Arsyad, Lincolin. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: unit penerbit dan percetakan STIM YKPN
- Aziz, Abdul. (2008). *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Azwar, Saifuddin. (2014). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Beik, Irfan Syauqi dan Laily Dwi Arsyanti. (2016). *Ekonomi Pembangunan Syari'ah, edisi revisi*. Jakarta: Rajawali Pers
- BPS, Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Selatan 2016
- BPS, Sumatera Selatan
- BPS, Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Selatan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010-2016
- Firdaus, Muhammad. (2011). *Ekonometrika Suatu Pendekatan Aplikatif*. Jakarta: Bumi Aksara
- Ghazali, Imam. (2009). *Aplikasi Analisis Multivariate Program*. Semarang: BP UNDIP
- Huda, Nurul, DKK. (2015). *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta : Prenadamedia
- Huda, Nurul. (2008). *Ekonomi Makro Islam : Pendekatan Teoritis*. Jakarta : Kencana
- Kuncoro, Mudrajad. (2015). *Mudah Memahami dan Menganalisis Indikator Ekonomi cetakan kedua*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN

- M.L. Jhingan. (2014). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Mangkoesoebroto, Guritno. (1993). *Ekonomi Publik*. Yogyakarta:BPFE
- Mankiw, N. Gregoru. (2006). *Principles of economics pengantar ekonomi mikro*. Jakarta: Salemba Empat
- Mubyarto. (1999). *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. Yogyakarta: Aditiya Media
- Nasir, Muhammad. (1999). *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Ghalia Indonesia
- P. Todaro, Michael dan Stephen C. Smith. (2011). *Pembangunan Ekonomi*. Penerbit Erlangga
- Rasyid, Suherman . (2003). *Pengantar Teori Ekonomi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Ridwan, Muhtadi. (2012). *Geliat Ekonomui Islam: Memangkas Kemiskinan, Mendorong Perubahan*. Malang: UIN Maliki Press
- Susanti, Hera, Moh. Ikhsan, Widyanti. (1995). *Indikator-indikator makroekonomi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&d* . Bandung, Alfabeta
- Sukirno, Sadono. (2005). *Makro Ekonomi Modern*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Sukirno, Sadono. (2008). *Teori Pengantar Makro Ekonomi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Winarno, Wing Wahyu. (2015). *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Jurnal dan Skripsi

Astri, Meylina, Sri Indah dan Harya Kuncara. “ Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia”, *jurnal pendidikan ekonomi dan bisnis* VOL.1 No. 1 Maret 2013

Usmalidanti, Christina, “ Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2009”, *Skripsi*, Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, 2011. (diterbitkan)

Suban, Ezra Valentino Calvin, “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pemerintah sektor Publik terhadap Indeks Pembangunan Manusia 2007-2015”, *Skripsi*, Jogjakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, 2017. (diterbitkan)

Mirza, Denni Sulistio, “Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah tahun 2006-2009”, *Economics Development Analysis Journal*. Vol 4, No 2, September 2011

Sasana, Hadi, “Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah dan Pendapatan Perkapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah)”, *Jurnal Media Ekonomi dan Manajemen*, Vol 25. No 1 Januari 2012.

Anand, Sudhir dan Martin Ravillion.”Human Development in Poor Countries: On the Role of Private Incomes and Public Services”, *Journal of Economic Perspectives*, VOL. 7. Pp. 133-150. November 1993

Septiana M. Dkk, “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara”, *Jurnal Berkah Ilmiah Efisiensi*. Vol.15 no.02, 2015

Sudiharta, Putu Seruni Pratiwi dan Ketut Sutrisna, “Pengaruh PDRB Per Kapita, Pendidikan, dan Produktivitas Tenaga Kerja terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali”, *E-Jurnal EP Unud*, 3[10] : 431-439.

Zamharir, Amirul, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, PDRB Perkapita, dan Upah Minimum terhadap *Human Development Indek*” *Skripsi*, Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, 2016. (diterbitkan)

Suliswanto, Muhammad Sri Wahyudi, “Pengaruh PDB dan IPM terhadap Angka Kemiskinan di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi Pembanguna*, Vol 8 No. 2. Desember 2010

Cahya, Bayu Tri, “Kemiskinan Ditinjau dari Perpppekstif Al-Qur’an dan Hadis”, *Jurnal Penelitian*, Vol. 9, No, 1, Februari 2015

Hadits ini dikeluarkan oleh Imam al-Baihaqi dalam kitab “Syu’abul Imam” (no.6612), Abu Nu’aim Al-Ashbahani dalam “Hilyatul auliyaa” (3/53 dan 109), Al-Qudha’i dalam “Musnadusy Syihab” (no.586), Al’Uqaili dalam “Adh-Dhu’afaa” (no. 1979) dan Ibnu ‘Adi dalam “Al-Kamil” (7/236), dari Yaid bin Abanar-Raqa_syi, dari Anas bin Malik RA, dari Rasulullah SAW. <https://muslim.or.id/18982-hadits-lemah-hampir-hampir-kemiskinan-itu-menjadi-kekafiran.html> (diakses tanggal 1 September 2018: jam 00.15)

Widodo, Adi, Waridin dan Johanna Maria K, “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Pengetasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah”, *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Vol 1, No 1 (Juli 2011)

Ajeng Pradesti Amanda Putri, "Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Publik Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2013", *Skripsi*, (Yogyakarta : Program Studi Ilmu Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, 2015), (diterbitkan)

Ezra Valentino Calvin Suban, "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Publik Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia 2007-2015", *Skripsi*, (Yogyakarta : Departemen Ilmu Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, 2017), (diterbitkan)

Ana Mei Rafika, "Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Se-Indonesia", *Skripsi*, (Bandar Lampung : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, 2017), (diterbitkan)

Nursiah Chalid dan Yusbar Yusuf, "Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di provinsi Riau", *Jurnal Ekonomi, Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Riau*, Vol 22, No 2 Juni 2014

Khoirul Fikri T. "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Tahun 2004-2013", *Skripsi*, (Yogyakarta : Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, 2016), (diterbitkan)

Risanda Alirasta Budiantoro, "Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pertumbuhan ekonomi dan Alokasi APBD bidang Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia, 2011-2015", *Skripsi*, (Yogyakarta : Departemen Ilmu Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, 2017), (diterbitkan)

Devyanti Patta, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan Periode 2001-2010", *Skripsi*,

(Makasar : Fakultas Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin, 2012), (diterbitkan)

Neng Sinta Lela Sari, berjudul “Analisis Pengaruh Pendapatan Perkapita, Pengeluaran Pemerintah Daerah, Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) dan Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2009-2015”, *Skripsi*, (Bandung : Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan, 2017), (diterbitkan)

Aris Setia Budi, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dan Perimbangan dan Belanja Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2012-2014”, *Skripsi*, (Surakarta : Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islama Negrei Surakarta, 2017), (diterbitkan)

Internet

<https://sumsel.bps.go.id>

www.djpk.kemenkeu.go.id

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Data Penelitian

Data Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan, Pendapatan Perkapita, dan Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Selatan Tahun 2010-2016

Kabupaten/Kota	Tahun	IPM	Tingkat Kemiskinan	PP sektor Pendidikan	PP sektor Kesehatan	PDRB
Ogan Komering Ulu	2010	64.13	10,59	25,82	24,99	15,71
Ogan Komering Ilir	2010	61.04	11,67	26,37	25,20	16,34
Muara Enim	2010	62.12	11,56	26,55	25,51	16,89
Lahat	2010	62.31	11,16	26,23	25,10	15,96
Musi Rawas	2010	59.69	11,53	26,25	25,20	16,02
Musi Banyuasin	2010	61.79	11,64	19,88	19,03	17,27
Banyuasin	2010	60.31	11,44	26,39	24,88	16,33
OKU Selatan	2010	58.88	10,51	18,34	17,28	15,11
OKU Timur	2010	63.36	11,00	26,21	24,59	15,62
Ogan Ilir	2010	61.62	10,88	26,13	24,45	15,30
Empat Lawang	2010	61.11	10,39	25,20	23,93	14,65
Palembang	2010	73.33	12,29	27,11	25,43	17,93
Prabumulih	2010	69.39	9,95	25,30	24,62	14,92
Pagar Alam	2010	61.97	9,43	24,85	24,42	14,20
Lubuk Linggau	2010	70.72	10,34	25,59	24,50	14,77
Ogan Komering Ulu	2011	64.62	10,55	26,03	25,01	15,76
Ogan Komering Ilir	2011	61.68	11,63	26,76	25,35	16,41
Muara Enim	2011	62.82	11,52	26,86	25,67	17,01
Lahat	2011	62.93	11,12	26,39	25,22	16,01
Musi Rawas	2011	60.63	11,49	26,44	25,25	16,03
Musi Banyuasin	2011	62.56	11,60	27,00	19,02	17,31
Banyuasin	2011	61.04	11,40	26,73	25,07	16,38
OKU Selatan	2011	59.74	10,47	25,92	24,35	15,16
OKU Timur	2011	64.27	10,96	26,55	24,82	15,69
Ogan Ilir	2011	62.47	10,85	26,36	24,43	15,37
Empat Lawang	2011	61.86	10,35	25,58	23,99	14,70
Palembang	2011	74.08	12,25	27,42	25,59	17,99
Prabumulih	2011	70.32	9,91	25,53	24,69	14,99
Pagar Alam	2011	62.71	9,39	25,42	24,33	14,25
Lubuk Linggau	2011	71.62	10,30	23,46	24,37	14,83
Ogan Komering Ulu	2012	65.09	10,54	26,22	25,06	15,81
Ogan Komering Ilir	2012	62.29	11,61	26,86	25,42	16,47

Muara Enim	2012	63.34	11,50	26,92	26,14	17,09
Lahat	2012	63.66	11,11	26,66	25,41	16,06
Musi Rawas	2012	61.37	11,48	26,43	25,40	16,04
Musi Banyuasin	2012	63.27	11,58	20,15	19,12	17,38
Banyuasin	2012	61.69	11,38	26,88	25,16	16,44
OKU Selatan	2012	60.63	10,46	25,89	24,38	15,22
OKU Timur	2012	65.18	10,94	26,48	25,30	15,75
Ogan Ilir	2012	63.03	10,83	26,38	24,69	15,45
Empat Lawang	2012	62.30	10,33	25,50	24,24	14,76
Palembang	2012	74.74	12,24	27,69	25,81	18,07
Prabumulih	2012	70.95	9,90	25,65	24,91	15,07
Pagar Alam	2012	63.33	9,37	25,34	24,68	14,31
Lubuk Linggau	2012	72.04	10,28	25,92	24,74	14,90
Ogan Komerling Ulu	2013	65.51	10,65	26,53	25,38	15,86
Ogan Komerling Ilir	2013	63.52	11,71	26,97	25,57	16,53
Muara Enim	2013	64.34	11,59	27,05	25,91	17,15
Lahat	2013	64.15	11,18	26,82	25,54	16,11
Musi Rawas	2013	62.23	11,50	26,66	25,64	16,10
Musi Banyuasin	2013	64.18	11,58	27,18	26,22	17,42
Banyuasin	2013	62.42	11,48	27,08	25,50	16,50
OKU Selatan	2013	61.58	10,57	26,12	24,79	15,27
OKU Timur	2013	66.09	11,09	26,67	25,36	15,82
Ogan Ilir	2013	63.64	10,92	26,73	24,95	15,52
Empat Lawang	2013	62.74	10,32	25,75	24,61	14,82
Palembang	2013	75.49	12,24	27,83	25,85	18,12
Prabumulih	2013	71.87	9,87	25,81	25,07	15,12
Pagar Alam	2013	64.14	9,38	25,58	24,90	14,37
Lubuk Linggau	2013	72.55	10,33	26,04	24,94	14,93
Ogan Komerling Ulu	2014	66.21	10,63	26,55	25,53	15,89
Ogan Komerling Ilir	2014	63.87	11,69	27,04	25,59	16,58
Muara Enim	2014	65.02	11,57	27,05	25,97	17,18
Lahat	2014	64.52	11,16	26,99	25,67	16,15
Musi Rawas	2014	63.19	11,48	26,23	25,43	16,17
Musi Banyuasin	2014	64.93	11,56	27,26	26,39	17,46
Banyuasin	2014	63.21	11,47	27,15	25,68	16,55
OKU Selatan	2014	61.94	10,55	26,28	25,05	15,32
OKU Timur	2014	66.74	11,09	26,89	25,52	15,87
Ogan Ilir	2014	64.49	10,90	26,75	25,17	15,58
Empat Lawang	2014	63.17	10,32	25,92	25,24	14,86
Palembang	2014	76.02	12,22	27,90	26,09	18,17
Prabumulih	2014	72.20	9,85	26,10	25,25	15,23
Pagar Alam	2014	64.75	9,38	25,66	25,05	14,41
Lubuk Linggau	2014	72.84	10,31	26,19	25,15	14,99
Ogan Komerling Ulu	2015	67.18	10,74	26,70	25,88	15,92

Ogan Komerling Iilir	2015	64.73	11,81	27,17	25,87	16,63
Muara Enim	2015	65.82	11,37	27,06	26,16	17,26
Lahat	2015	65.25	11,17	26,97	25,83	16,17
Musi Rawas	2015	64.11	10,97	26,62	25,70	16,22
Musi Banyuasin	2015	65.76	11,63	27,21	26,51	17,49
Banyuasin	2015	64.15	11,52	27,16	25,95	16,60
OKU Selatan	2015	62.57	10,61	26,32	25,22	15,36
OKU Timur	2015	67.17	11,20	26,92	25,72	15,93
Ogan Iilir	2015	65.35	10,98	26,83	25,20	15,63
Empat Lawang	2015	63.55	10,36	26,05	25,35	14,90
Palembang	2015	76.29	12,22	28,01	26,54	18,23
Prabumulih	2015	73.19	9,97	26,18	25,46	12,60
Pagar Alam	2015	65.37	9,46	25,61	25,19	14,45
Lubuk Linggau	2015	73.17	10,41	26,24	25,16	15,05
Ogan Komerling Ulu	2016	67.47	10,76	26,53	25,78	15,96
Ogan Komerling Iilir	2016	65.44	11,76	27,08	26,22	16,67
Muara Enim	2016	66.71	11,32	27,06	26,41	17,31
Lahat	2016	65.75	11,12	27,02	25,95	16,20
Musi Rawas	2016	64.75	10,92	24,48	23,87	16,27
Musi Banyuasin	2016	66.45	11,58	27,24	26,50	17,51
Banyuasin	2016	65.01	11,47	27,03	26,19	16,66
OKU Selatan	2016	63.42	10,56	26,17	25,03	15,42
OKU Timur	2016	67.38	11,21	26,91	26,14	15,99
Ogan Iilir	2016	65.45	10,95	26,24	24,53	15,68
Empat Lawang	2016	64.00	10,31	25,83	25,14	14,95
Palembang	2016	76.59	12,16	27,82	26,63	18,28
Prabumulih	2016	73.38	9,93	25,97	25,54	15,34
Pagar Alam	2016	65.96	9,43	22,81	22,46	14,50
Lubuk Linggau	2016	73.57	10,34	26,14	25,30	15,11

Lampiran 2

Hasil Pengolahan Data

Regresi *Pooled Least Square*

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 10/22/18 Time: 19:43
Sample: 2010 2016
Periods included: 7
Cross-sections included: 15
Total panel (balanced) observations: 105

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	-0.039138	0.012794	-3.059072	0.0028
X2	0.000340	0.005679	0.059907	0.9523
X3	0.008173	0.005209	1.569172	0.1198
X4	0.028336	0.008545	3.316255	0.0013
C	41.82098	8.207036	5.095747	0.0000
R-squared	0.173528	Mean dependent var		65.52924
Adjusted R-squared	0.140469	S.D. dependent var		4.244140
S.E. of regression	3.934781	Akaike info criterion		5.624035
Sum squared resid	1548.250	Schwarz criterion		5.750414
Log likelihood	-290.2619	Hannan-Quinn criter.		5.675247
F-statistic	5.249048	Durbin-Watson stat		0.171313
Prob(F-statistic)	0.000703			

Sumber: diolah Eviews 10

Regresi *Fixed Effect Model*

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 10/19/18 Time: 13:12
Sample: 2010 2016
Periods included: 7
Cross-sections included: 15
Total panel (balanced) observations: 105

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	44.58450	18.29700	2.436710	0.0169
X1	-0.009135	0.014717	-0.620708	0.5364
X2	-0.001558	0.001902	-0.818913	0.4151
X3	0.006178	0.001823	3.389229	0.0011
X4	0.012269	0.004981	2.463156	0.0158

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.926648	Mean dependent var	65.52924
Adjusted R-squared	0.911296	S.D. dependent var	4.244140
S.E. of regression	1.264043	Akaike info criterion	3.468800
Sum squared resid	137.4113	Schwarz criterion	3.949040
Log likelihood	-163.1120	Hannan-Quinn criter.	3.663403
F-statistic	60.35751	Durbin-Watson stat	0.630737
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: diolah Eviews 10

Regressi *Random Effect Model*

Dependent Variable: Y
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 10/19/18 Time: 13:14
 Sample: 2010 2016
 Periods included: 7
 Cross-sections included: 15
 Total panel (balanced) observations: 105
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	48.00161	12.35508	3.885174	0.0002
X1	-0.012527	0.010770	-1.163165	0.2475
X2	-0.001544	0.001900	-0.812261	0.4186
X3	0.006240	0.001816	3.436776	0.0009
X4	0.012333	0.004613	2.673442	0.0088

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		4.142220	0.9148
Idiosyncratic random		1.264043	0.0852

Weighted Statistics			
R-squared	0.272590	Mean dependent var	7.508361
Adjusted R-squared	0.243494	S.D. dependent var	1.441345
S.E. of regression	1.253643	Sum squared resid	157.1622
F-statistic	9.368535	Durbin-Watson stat	0.561162
Prob(F-statistic)	0.000002		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.127233	Mean dependent var	65.52924
Sum squared resid	1634.975	Durbin-Watson stat	0.053942

Sumber: diolah Eviews 10

Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
 Equation: Untitled
 Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	63.070375	(14,86)	0.0000
Cross-section Chi-square	254.299719	14	0.0000

Sumber: diolah Eviews10

Uji Hausmant

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	2.361283	4	0.6696

Sumber: diolah Eviews 10



PROGRAM STUDI EKONOMISYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

Alamat: Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri, Telepon 0711 353276, Palembang 30126

LEMBAR KONSULTASI

Nama : Mahar Amaini Laili
NIM : 14190174
Fakultas/Jurusan : FEBI/Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan dan Pendapatan Perkapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Selatan Tahun 2010-2016
Pembimbing I : Titin Hartini, SE., M.Si

No.	Hari/Tanggal	Hal Yang Di Konsulkan	Paraf
1	Kamis / 20-07-2018	Dibicarakan untuk mengotai / Memasukkan variabel pendapatan perkapita perbaikan Bab I, II, III. kembali ke pembimbing untuk konsultasi pemasukan variabel	
2	Senin / 10-10-2018	Perbaikan Bab I, II, & III Masukan kembali pokok lanjutan hasil kesimpulan & penulisan.	
3	Kamis / 25-10-2018	Ace Bab I, II, & III. Lanjut Bab IV & V.	
4	Selasa / 13-11-2018	Perbaikan Bab IV & V	
5	Desember / 10-11-2018	Perbaikan lagi perubahan ke H1 & H2. & Bab V	



PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

Alamat: Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri, Telepon 0711 353276, Palembang 30126

LEMBAR KONSULTASI

Nama : Mahar Amaini Laili
NIM : 14190174
Fakultas/Jurusan : FEBI/Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan dan Pendapatan Perkapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Selatan Tahun 2010-2016
Pembimbing I : Titin Hartini, SE., M.Si

No.	Hari/Tanggal	Hal Yang Di Konsulkan	Paraf
6.	Senin / 19-11-2018	Perbaiki lagi penulisan di Bab 1 & 2	
7.	Senin / 19-11-2018	Ace Bab 1 & 2. Sampai diujikan dan lolos cek plagiat.	



PROGRAM STUDI EKONOMISYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

Alamat: Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri, Telepon 0711 353276, Palembang 30126

LEMBAR KONSULTASI

Nama : Mahar Amaini Laili
NIM : 14190174
Fakultas/Jurusan : FEBI/Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan dan Pendapatan Perkapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Selatan Tahun 2010-2016
Pembimbing I : Isnayati Nur, M.Esy

No.	Hari/Tanggal	Hal Yang Di Konsulkan	Paraf
1.	Kamis / 12 - 07 - 2018	Revisi proposal	<i>[Signature]</i>
2.	Selasa / 29 - 07 - 2018	Revisi proposal	<i>[Signature]</i>
3.	Kabu / 01 - 08 - 2018	Acc proposal	<i>[Signature]</i>
4.	Kabu / 01 - 08 - 2018	Acc Bab I	<i>[Signature]</i>
5.	Selasa / 14 - 08 - 2018	Revisi Bab II - perbaiki sistematis & Teori	<i>[Signature]</i>
6.	Selasa / 21 - 08 - 2018	Revisi Bab II	<i>[Signature]</i>
7.	Selasa / 28 - 08 - 2018	Acc Bab II	<i>[Signature]</i>
8.	Selasa / 09 - 09 - 2018	Revisi Bab III - perbaiki populasi & sampel	<i>[Signature]</i>
9.	Kabu / 15 - 09 - 2018	Acc Bab III	<i>[Signature]</i>
10.	Kabu / 13 - 09 - 2018	Perbaikan penulisan Bab I & II II (ada tambahan variabel)	<i>[Signature]</i>
11.	Kamis / 26 - 10 - 2018	Perbaiki Bab Acc Bab III Perbaiki sesuai usulan	<i>[Signature]</i>
12.	Kabu / 31 - 10 - 2018	sebaiknya sistematis Bab IV & Bab III	<i>[Signature]</i>



PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

Alamat: Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri, Telepon 0711 353276, Palembang 30126

LEMBAR KONSULTASI

Nama : Mahar Amaini Laili
NIM : 14190174
Fakultas/Jurusan : FEBI/Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan dan Pendapatan Perkapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Selatan Tahun 2010-2016
Pembimbing I : Isnayati Nur, M. Esy i

No.	Hari/Tanggal	Hal Yang Di Konsulkan	Paraf
13	Jum'at, 2 Nov 18	ACC - Bab 1 - V ACC ke Pembimbing I ACC - untuk komprehensif	



Alamat : Jl. Prof. KH. ZainalAbidinFikri, Telepon 0711 353276, Palembang 30126

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

Formulir D.2

Hal : **Mohon Izin Penjilidan Skripsi**

Ibu Wakil Dekan I
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan ini kami menyatakan bahwa mahasiswa :

Nama : Mahar Amaini Laili
Nim/Jurusan : 14190174 / Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan, dan Pendapatan Perkapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Tahun 2010-2016

Telah selesai melaksanakan perbaikan, terhadap skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari para penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Palembang, Desember 2018

Penguji Utama

Penguji Kedua

Chandra Zaky Maulana, MM
NIP. 197912232009121002

Erdah Litriani, Se, M.Ec.,Dev
NIK. 150620121482



Mengetahui
Wakil Dekan I

Indah Bukhatulikhah, M.Ag
NIP. 509282006042001

Daftar Riwayat Hidup

Nama : Mahar Amaini Laili
Tempat, Tanggal Lahir : Karang Agung, 01 Juni 1996
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Mahasiswa
Nama Orang Tua
Ayah : Syahru Shiamudin
Ibu : Aisyati
Status dalam Keluarga : Anak Kedua dari 3 Bersaudara
Nama Saudara
Kakak : Mahrimin Ahadi
Adik : Timi Hijjati
Alamat : Desa Karang Agung, Kec. Kota Agung, Kab. Lahat
No. Hp : 0813-7376-9220
Email : amawonibrahim189@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

Pendidikan Formal

Institusi	Tahun
SD Negeri 02 Kota Agung	2001-2008
MTS Negeri Kota Agung	2008-2011
MAN Lahat	2011-2014
S1 UIN Raden Fatah Palembang Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam	2014-2018